

PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU

(Morphology of Growth of Riau Province)



Oleh

Prof. Dr. H.B. Isyandi, SE., MSc

**PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR TETAP
BIDANG ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS RIAU**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT SENAT
UNIVERSITAS RIAU**

PEKANBARU, 15 AGUSTUS 2009

PIDATO ILMIAH

PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU

(Morphology of Growth of Riau Province)

Bismillahirrahmanirrahim,

Yth. Bapak Ketua dan Anggota Dewan Penyantun Universitas Riau,

Yth. Bapak Rektor/ Ketua Senat Universitas Riau,

Yth. Bapak Sekretaris Senat Universitas Riau, Para Guru besar dan Anggota Senat Universitas Riau,

Yth. Para Pejabat Sipil, TNI dan Polri,

Yth. Para Pembantu Rektor, Para Dekan dan Ketua Lembaga, beserta seluruh Civitas Akademika Universitas Riau,

Yth. Para Undangan dan hadirin lainnya,

Assalamu'Alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh,

Para Undangan yang berbahagia;

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahuwataala, karena atas rakhmat, karunia dan ridho-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal affiat.

Selanjutnya perkenankan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan Universitas, Para Guru Besar dan Dekan Fakultas Ekonomi atas kesempatan waktu dan peluang yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan Pidato Ilmiah dalam rangka pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam bidang *Ilmu Ekonomi Pembangunan* pada Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Dalam pidato pengukuhan ini, saya akan mencoba mengemukakan hasil kajian teoritik dan hasil penelitian mengenai Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Perubahan Struktur Perekonomian Provinsi Riau

A. PENDAHULUAN : *Morphology of Growth*

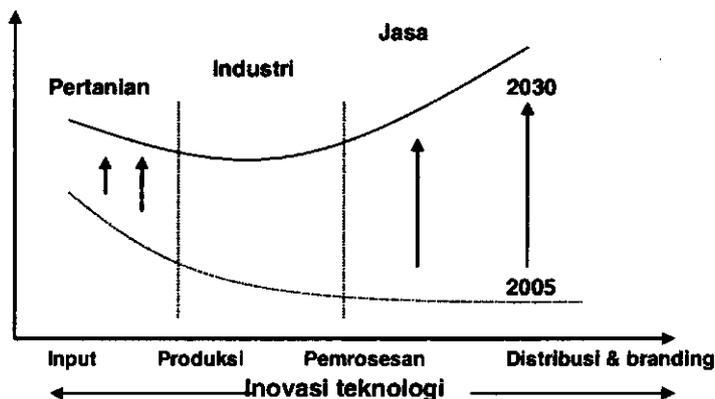
Hadirin yang saya hormati,

Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh sebahagian besar negara disertai dengan perubahan struktur perekonomian. Perubahan struktur dimaksud adalah menurunnya kontribusi sektor pertanian dan meningkatnya kontribusi sektor industri, baik dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) maupun dari kesempatan kerja. Perubahan struktur perekonomian tersebut merupakan proses industrialisasi.

Dalam beberapa dasawarsa belakangan ini, perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan yang mendasar. Arah kebijaksanaan pembangunan yang merupakan rangkaian pembangunan ekonomi adalah upaya untuk mewujudkan Indonesia yang modern, maju dan memenuhi kebutuhan masyarakatnya (Visi Indonesia 2030), melalui pencapaian struktur ekonomi yang seimbang. Setidaknya, rangkaian tersebut telah terlihat pada era Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama 1969-1993 (Pelita-I sampai dengan Pelita V) yang sekarang dilanjutkan dengan era reformasi dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), yang mana Indonesia akan mencapai pendapatan per kapita sekitar US\$ 18 ribu dengan nilai PDB sebesar US\$ 5,1 triliun pada tahun 2030 (Indonesia Forum, 2007). Secara bertahap pemerintah berusaha untuk mengubah perekonomian yang bertumpu pada sektor pertanian dan pertambangan sebagai sektor primer ke arah struktur ekonomi yang lebih seimbang, yaitu industri manufaktur yang kuat yang didukung oleh sektor pertanian yang serasi (sebagaimana terlihat pada gambar 1).

Perubahan struktur perekonomian dapat dilihat dari

pertumbuhan dan perubahan komposisi produk domestik bruto (PDB). Pertumbuhan dan perubahan komposisi PDB Indonesia menurut sektor utama kegiatan ekonomi menunjukkan perubahan yang mendasar. Peranan sektor industri manufaktur dalam produk nasional meningkat dari 11,14 persen pada tahun 2000 menjadi 21,20 persen pada tahun 1993, bahkan meningkat menjadi 27,9 persen pada tahun 2008. (atas dasar harga konstan tahun 1983). Peranan sektor pertanian dalam periode yang sama telah menurun dari 42,96 persen menjadi 31,45 persen. Demikian juga halnya dengan perkembangan laju rata-rata pertumbuhan sektor industri adalah 12,13 persen, jauh melampaui laju pertumbuhan rata-rata sektor pertanian yang hanya 3,76 persen dalam periode 1983-1993 (BPS, Statistik Indonesia, berbagai penerbitan). Pada periode tahun 2001-2003, ekonomi hanya tumbuh rata-rata sebesar 4,2%, dan pertumbuhan inipun terutama didorong oleh konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ini jauh di bawah pertumbuhan ekonomi sebelum resesi yang rata-rata berkisar 7– 8% per tahun. Investasi hanya tumbuh sebesar rata-rata 3,5% dan ekspor tumbuh sebesar rata-rata 2,1%. Padahal sebelum krisis, investasi dan ekspor masing-masing tumbuh sebesar rata-rata 10,4% dan 10%. Hal ini diantaranya disebabkan karena daya saing Indonesia mengalami penurunan.



Gambar 1 : Penciptaan nilai tambah di sektor Industri dan Jasa

Di sisi produksi, pertumbuhan industri pengolahan non-migas hanya tumbuh sebesar rata-rata 5,6%, jauh dibawah sebelum krisis yang mencapai 12,5%. Dalam kondisi ini, pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pengangguran meningkat menjadi 9,5 juta pada tahun 2003 dibandingkan dengan 4,2 juta pada tahun 1997. Bahkan data BPS menyebutkan bahwa per Agustus 2008 tingkat pengangguran terbuka mencapai 8,46 persen. Angka ini belum termasuk katagori pengangguran terselubung, sehingga dengan pertumbuhan angkatan kerja yang setiap tahun meningkat, diperkirakan tingkat pengangguran tahun 2009 sebesar 9 persen yang merupakan besaran tingkat pengangguran tertinggi di Asia.

Meningkatnya jumlah pengangguran menyebabkan makin tingginya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin yang tinggi dalam 10(sepuluh) tahun terakhir di Indonesia merupakan persoalan besar dalam kajian ekonomi pembangunan. Jumlah penduduk miskin tercatat mencapai 36,1 juta jiwa atau 16,6% penduduk pada tahun 2004.

Tabel 1 : Perkembangan Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Indonesia, menurut Pulau, tahun 2007-2008.

Wilayah	Angka Kerja (juta orang)		Bekerja (juta orang)		Tingkat Pengangguran (%)	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Sumatra	21,7	22,6	19,7	20,8	8,9	8,0
Jabalnusra	64,2	63,9	58,6	58,7	8,8	8,1
Jawa (non Jakarta-Banten)	57,9	57,6	52,6	52,7	9,0	8,5
Bali-Nusa Tenggara	6,2	6,3	5,9	6,0	4,8	4,4
Jakarta-Banten	8,4	9,1	7,2	7,9	14,3	13,6
Kali-Sulampua	15,7	16,4	14,4	15,2	8,7	7,2
Kalimantan	6,1	6,4	5,7	6,0	7,5	6,8
Sulawesi	7,4	7,6	6,6	7,0	9,9	7,8
Maluku-Papua	2,2	2,4	2,1	2,2	7,6	6,7

Sumber : BPS (diolah)

Dari sisi pembangunan ekonomi, meskipun tidak meningkat secepat yang diharapkan, pertumbuhan ekonomi terus mengalami perkembangan. Pertumbuhan produk domestik bruto

(PDB) tahun 2008 meningkat sebesar 6,1 persen terhadap tahun 2007, terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor pengangkutan dan komunikasi 16,7 persen dan terendah di sektor pertambangan dan penggalian 0,5 persen. Pertumbuhan PDB tanda migas tahun 2008 mencapai 6,5 persen. Besaran PDB Indonesia pada tahun 2008 atas dasar harga berlaku mencapai Rp.4.954,0 trilyun, sedangkan atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp.2.082,1 trilyun, sehingga PDB per kapita tahun 2008 mencapai Rp.21,7 juta (US\$2.271,2) jauh lebih besar dibanding tahun 2007 sebesar Rp.17,5 juta (US\$1.942,1).

Dari sisi penggunaan, PDB tahun 2008 digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 61,0 persen, konsumsi pemerintah 8,4 persen, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar 27,7 persen, ekspor sebesar 29,8 persen dan impor sebesar 28,6 persen. Artinya, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sebesar 6,1 persen didukung oleh *sumber utama pertumbuhan* yakni ekspor 4,6 persen, konsumsi rumah tangga 3,1 persen, pembentukan modal tetap bruto 2,6 persen dan konsumsi pemerintah 0,8 persen.

Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan 1-2009 mencapai Rp1.300,3 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2000 besarnya mencapai Rp527,3 triliun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1-2009 dibandingkan triwulan IV-2008, yang diukur dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat sebesar 1,6 persen (q-to-q). Pertumbuhan ini terjadi pada sektor pertanian, sektor listrik-gas-air bersih, sektor pengangkutan-komunikasi, sektor keuangan real-estat, jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pertanian sebesar 19,3 persen, utamanya disebabkan oleh siklus panen raya tanaman padi tahunan yang terjadi pada Januari tahun 2009. PDB Indonesia pada triwulan I-2009 dibandingkan triwulan yang sama tahun 2008 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,4 persen. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2009 dibandingkan

dengan triwulan IV-2008 secara riil meningkat sebesar 0,8 persen, sedangkan pengeluaran konsumsi pemerintah menurun 28,7 persen, serta pembentukan modal tetap bruto turun 5,4 persen, demikian juga ekspor barang-jasa turun sebesar 17,2 persen dan komponen impor barang-jasa turun sebesar 18,6 persen. Komponen pengeluaran pada triwulan I-2009 dibandingkan triwulan yang sama tahun 2008 mengalami peningkatan, yakni: pengeluaran konsumsi rumah tangga naik sebesar 5,8 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah 19,2 persen, dan pembentukan modal tetap bruto 3,5 persen. Sementara itu, kegiatan perdagangan luar negeri mengalami penurunan, ekspor barang dan jasa turun sebesar 19,1 persen, dan impor barang dan jasa turun sebesar 24,1 persen. Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan I-2009 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 58,3 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 23,4 persen, Pulau Kalimantan 9,4 persen, dan Pulau Sulawesi 4,3 persen dan sisanya 4,6 persen di pulau-pulau lainnya.

Tabel 2 : Struktur PDB Indonesia Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007- 2009 (persentase).

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2007	2008	Triw-I 2009
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	13,7	14,4	15,8
2.	Pertambangan dan Penggalian	11,2	11,0	8,8
3.	Industri Pengolahan	27,1	27,9	27,3
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,9	0,8	0,9
5.	Konstruksi	7,7	8,4	9,6
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,9	14,0	13,4
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,7	6,3	6,6
8.	Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	7,7	7,4	7,6
9.	Jasa-jasa	10,1	9,8	10,0
PDB		100,0	100,0	100,0
PDB Tanpa Migas		89,5	89,3	92,9

Sumber : BPS, berbagai tahun publikasi, diolah.

Proses perubahan struktur perekonomian Indonesia ini, tentunya tidak dapat dipisahkan dari peranan perekonomian Provinsi Riau. Hal ini karena Provinsi Riau memiliki sumber daya alam (migas) yang sangat potensial untuk dikembangkan. Potensi tersebut merupakan sektor unggulan daerah. Sumberdaya alam berupa migas maupun non migas merupakan stimulus pertumbuhan ekonomi. Produksi minyak bumi Provinsi Riau tahun 2004 sebesar 181.302 juta barel; tahun 2005 sebanyak 166,224 juta barel; tahun 2006 sebanyak 157.765 juta barel; dan tahun 2007 sebanyak 157.770 juta barel. Faktor ini menunjukkan kontribusi minyak bumi sangat signifikan dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi provinsi Riau. Sesuai UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah maka dari hasil minyak bumi tersebut provinsi Riau mendapatkan dana bagi hasil sebesar Rp.7,1 trilyun untuk tahun 2005

Di samping minyak mentah, sumber daya alam yang potensial lainnya adalah gambut, pasir, granit, batu bara (cadangan batubara tersebar di beberapa kabupaten seperti Kampar, Kuansing, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir). Selain potensi minyak bumi dan batu bara juga terdapat perkebunan. Luas perkebunan di Provinsi Riau tahun 2007 adalah 2.715.781 Ha dengan komoditi kelapa sawit seluas 1.611.382 Ha, kelapa seluas 550.022 Ha, karet 532.901 Ha, serta aneka tanaman seluas 19.276 Ha. Di sektor industri terdapat industri kecil sebanyak 4.136 unit dan industri besar menengah sebanyak 400 unit (didominasi oleh crumb rubber, plywoods, pulp and paper, pengelolah CPO dan industri kapal).

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup baik. Pertumbuhan tersebut didukung oleh kontribusi PDRB kabupaten/kota yang tergambar pada Tabel 3. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Sumatra, Provinsi Riau merupakan provinsi yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya. Faktor inilah yang mendorong terjadinya proses industrialisasi.

Tabel 3 : Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota ADH berlaku dengan Migas Provinsi Riau (2005-2008).

No	Kab/Kota	Tahun			
		2005	2006	2007	2008
1	Kuansing	3,77	3,97	3,88	3,74
2	Inhul	4,33	4,51	4,55	4,44
3	Inhil	6,95	7,13	7,04	6,78
4	Pelalawan	4,97	4,98	4,86	4,67
5	Siak	16,24	15,78	16,12	16,49
6	Kampar	8,15	7,85	7,88	7,83
7	Rohul	3,92	3,91	3,73	3,41
8	Bengkalis	27,40	27,95	28,38	29,14
9	Rohil	11,21	11,03	11,10	11,12
10	Pekanbaru	10,03	9,92	9,57	9,13
11	Dumai	3,04	2,97	2,89	3,24
12	Total Kab/ Kota	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Riau dalam Angka 2004-2009, *diolah*.

Pada sisi lain, gambaran di atas juga memberi makna bahwa kontribusi PDRB kabupaten/kota di Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir masih didominasi oleh daerah penghasil sektor pertambangan yakni kabupaten Bengkalis, Siak dan Rokan Hilir. Ketiga kabupaten yang dikenal sebagai daerah penghasil migas tersebut pada tahun 2008 memberikan kontribusi masing-masing sebesar 29,14%, 16,49% dan 11,12 persen atau sebesar 56,75 persen dari total PDRB provinsi Riau, sedangkan sisanya sebesar 43,25 persen diberikan oleh 8(delapan) kabupaten/kota lainnya. Artinya, perekonomian Provinsi Riau digerakkan oleh 3(tiga) kabupaten penghasil migas terbesar yakni sektor pertambangan dan penggalian, selain sektor pertanian dan industri pengolahan. Namun kabupaten/kota lainnya walaupun mempunyai kontribusi kecil terhadap PDRB provinsi Riau, tetap mempunyai peran dalam menunjang pembangunan ekonomi Provinsi Riau.

Tolok ukur peranan sektor industri dalam perkembangan struktur pada suatu perekonomian yang terpenting ialah : (a) besarnya sumbangan sektor industri (*manufacturing*) terhadap produk

domestik regional bruto (PDRB), (b) jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh sektor industri, (c) besarnya sumbangan produk sektor industri terhadap ekspor barang dan jasa. Berdasarkan standar perkembangan industri relatif yang disusun oleh badan PBB untuk pembangunan industri (UNIDO), peranan sektor industri dalam perkembangan struktur ekonomi negara-negara dapat digolongkan menjadi empat tahap, yaitu : (1) pertanian/non-industri (*agriculture*), (2) menuju proses industrialisasi (*industrializing*), (3) semi-industri (*semi-industrialized*), dan (4) industri penuh (*industrialized*) (Isyandi, 1996).

Pengalaman ekonomi di negara-negara maju mengungkapkan karakteristik tingkat perubahan struktural melekat pada proses pertumbuhan. Perubahan struktural tersebut merupakan pergeseran yang bergerak sedikit demi sedikit dari aktivitas pertanian ke industri dan kemudian ke sektor jasa. Dalam hal ini proses perkembangan ekonomi ditandai dengan adanya perubahan dalam kontribusi sektoral terhadap keluaran nasional sebagai akibat terjadinya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan kemudian sektor jasa.

Dominannya sektor jasa *tingkat tinggi* dianggap sebagai tahap tertinggi dalam proses perkembangan ekonomi. Keadaan ini menyebabkan terjadinya suatu perubahan yang mendasar dalam skala dan atau ukuran rata-rata unit produksi. Selain itu, juga terjadi pergeseran lokasi dan status pekerjaan angkatan kerja dari pekerjaan sektor pertanian ke sektor industri manufaktur dan aktivitas jasa.

Untuk tercapainya keseimbangan antara sisi permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) baik barang dan jasa maupun tenaga kerja, diperlukan adanya keseimbangan antara pertumbuhan sektor industri dan pertanian. Sisi penawaran adalah pertumbuhan semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang dan jasa. Hal ini antara lain meliputi pertumbuhan bahan baku, barang setengah jadi, pertanian, pengairan, sumber energi, transportasi, serta

industri yang memproduksi barang konsumen. Sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh (Isyandi, 1996). Oleh sebab itu, strategi pembangunan dan kebijakan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan diarahkan agar dapat mengendalikan dan menciptakan pergeseran-pergeseran yang pada akhirnya menuju keserasian pertumbuhan antara sektor industri dan pertanian.

Sejalan dengan perubahan-perubahan nasional dalam memasuki era otonomi daerah, globalisasi dan internasionalisasi, perubahan struktur dan pertumbuhan sektoral perekonomian Provinsi Riau penting untuk dikaji (*Morphology of Growth of Riau Province*). Penelaahan tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Provinsi Riau ini, diperlukan untuk dapat menggambarkan perubahan struktur pada perekonomian Provinsi Riau.

B. KERANGKA PEMIKIRAN :

Potensi, Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi.

Hadirin yang saya hormati,

Pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan keluaran. Pembangunan ekonomi menyatakan bukan hanya peningkatan keluaran tetapi juga penambahan jenis keluaran yang dapat diproduksi di samping adanya perubahan teknologi produksi dan kelembagaan serta pendidtribusinya (Suryana, 2000). Dengan demikian, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menunjukkan/ memperlihatkan beberapa sektor tumbuh dengan lebih cepat dari sektor lainnya. Artinya proses pembangunan ekonomi mencakup perubahan komposisi produksi, perubahan pola alokasi sumber daya produksi di antara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pola distribusi kekayaan dan perubahan kelembagaan dalam kehidupan masyarakat. Keadaan ini dinamakan *perubahan struktur ekonomi*.

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya mencakup pembesaran faktor masukan yang akan mengakibatkan peningkatan pada keluaran, tetapi juga mencakup penambahan faktor masukan tersebut diiringi dengan efisiensi produksi yang lebih besar pula (kenaikan produktivitas, Suryana, 2000). Teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik, biasanya hanya menjelaskan satu dua macam keluaran dan sejumlah masukan yang terbatas. Hubungan antara keluaran dan masukan ini adalah hubungan kuantitatif yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis. Dengan demikian, model pertumbuhan ekonomi merupakan subyek yang dapat diukur dan diuji secara empiris.

Perubahan struktural pada hakikatnya menunjukkan bahwa selama pertumbuhan ekonomi berlangsung terjadi perbedaan dalam laju pertumbuhan produksi dari setiap sektor. Pada dasarnya kenaikan produksi suatu sektor dalam periode tertentu

adalah sebagai akibat dari adanya peningkatan dalam kuantitas dan kualitas faktor produksi yang digunakan melalui perkembangan teknologi pada sektor tersebut. Hal ini juga berarti bahwa selama pertumbuhan ekonomi berlangsung, kecepatan perkembangan penggunaan faktor produksi dan perkembangan teknologi berbagai sektor umumnya bervariasi. Dengan demikian, selama pertumbuhan ekonomi berlangsung alokasi sumber daya ke berbagai sektor mengalami perubahan.

Di samping pertumbuhan ekonomi, diperkirakan perubahan dalam alokasi sumber daya ke berbagai sektor di suatu negara juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk, kekayaan alam, dan kebijaksanaan ekonomi negara yang bersangkutan. Oleh karena jumlah penduduk, kekayaan alam dan kebijaksanaan ekonomi berbagai negara umumnya berbeda di antara satu dengan yang lain, pola perubahan struktur perekonomian selama pertumbuhan ekonomi di berbagai negara juga bervariasi.

Model pendekatan struktural menggunakan asumsi bahwa tidak semua sumber daya berhasil dialokasikan secara optimal sehingga terdapat berbagai ketidak seimbangan antar faktor produksi dalam setiap penggunaan yang berbeda. Dalam proses ini akan terjadi pergeseran alokasi sumber daya yang menimbulkan peningkatan keluaran dan produktivitas.

Pendekatan struktural mulai menarik perhatian para ahli ekonomi sejak setengah abad yang lalu. Penelitian tentang pertumbuhan dan perubahan struktural dirintis oleh Fisher (1935) Clark (1949), Lewis (1954), Kuznets (1966), dan Chennery dan Syrquin (1975). Hasil penelitian Fisher (1935) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi disertai dengan pergeseran permintaan dari sektor primer ke sektor sekunder dan akhirnya ke sektor tersier (Isyandi, 1996). Hal ini mengakibatkan perubahan dalam struktur produksi melalui pergeseran kesempatan kerja dan alokasi dana. Selanjutnya Clark (1949), juga melakukan pendekatan mengenai proses perkembangan ekonomi dan menyimpulkan bahwa makin tinggi

pendapatan per kapita suatu negara, makin kecil peranan sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja. Sebaliknya, sektor industri makin penting peranannya dalam menampung tenaga kerja. Jadi dalam hal ini terdapat hubungan yang erat antara perubahan struktur produksi dengan struktur kesempatan kerja dicapai melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di setiap sektor atau bergesernya tenaga kerja dari sektor dengan produktivitas lebih rendah ke sektor dengan produktivitas lebih tinggi.

Era globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah membawa pembaharuan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Dampak yang paling dirasakan adalah semakin ketatnya persaingan di berbagai sektor perekonomian. Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada agar mampu berkembang dalam arena persaingan seperti saat ini dan sekaligus menjadikannya sebagai motor penggerak perekonomian daerah di masa depan, maka potensi ekonomi yang ada harus mampu menjadi keunggulan daya saing daerah.

Tantangan utama dari pelaksanaan otonomi daerah dan pengembangan sektor riil adalah identifikasi dan pemahaman akan potensi ekonomi daerah. Secara makro, potensi ekonomi daerah biasanya juga menjadi salah satu indikator daya saing daerah tersebut. Hal itu karena potensi ekonomi suatu daerah akan ikut membentuk kompleksitas daya saing daerah. Oleh karena itu, dalam kajian ini kita membedakan antara konsep potensi ekonomi daerah dengan konsep daya saing daerah. Konsep potensi ekonomi daerah dipahami sebagai salah satu indikator daya saing daerah. Daya saing daerah sendiri mempunyai pengertian yang lebih luas daripada sekadar potensi ekonomi, karena dalam konsep daya saing daerah juga termasuk aspek kelembagaan, iklim sosial, iklim politik, kebijakan pemerintah, manajemen dan sebagainya.

Potensi ekonomi suatu daerah dengan daerah yang lain tidaklah sama, karena masing-masing daerah mempunyai ciri-

ciri khas dan karakteristik yang menempel sesuai dengan sumberdaya manusia, struktur alam, dan letak geografisnya. Namun potensi ekonomi daerah tersebut merupakan modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi, industri, investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pangsa pasar bagi produk-produk industri, pertanian dan jasa. Potensi ekonomi suatu daerah juga akan menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kemampuannya dalam penyerapan investasi, tenaga kerja, barang, jasa, dan tabungan.

Selain potensi yang menyangkut kinerja sektor perekonomian, potensi ekonomi suatu daerah juga dapat diukur berdasarkan infrastruktur dan sumberdaya alam yang ada di daerah tersebut. Indikator ini menandai ketersediaan modal fisik berupa infrastruktur, baik mengenai kuantitas dan kualitasnya dalam mendukung perekonomian daerah dan modal alamiah, serta kondisi geografis maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang juga akan mendorong aktivitas perekonomian daerah. Demikian juga teknologi informasi yang maju juga merupakan infrastruktur yang akan mendukung aktivitas bisnis di daerah.

Selain itu, untuk mengukur potensi ekonomi suatu daerah biasanya juga menggunakan indikator ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan sumberdaya manusia yang ada di daerah tersebut. Indikator Iptek digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam penerapan Iptek dalam berbagai aktivitas ekonomi sehingga meningkatkan nilai tambah. Sebab, keunggulan kompetitif daerah dapat dibangun melalui aplikasi teknologi yang sudah ada secara efisien dan inovatif.

Indikator sumberdaya manusia juga merupakan potensi ekonomi suatu daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusia yang ada di daerah tersebut. Tersedianya angkatan kerja yang besar dan berkualitas akan meningkatkan potensi ekonomi daerah bersangkutan (Isyandi, 2005). Demikian juga dengan adanya kualitas hidup masyarakat yang tinggi di suatu daerah juga akan

menjadi indikator potensi ekonomi daerah tersebut.

Indikator potensi ekonomi suatu daerah yang diukur berdasarkan pertumbuhan sektor perekonomian, biasanya dibagi ke dalam sembilan sektor yang terdapat dalam PDRB. Sembilan sektor tersebut adalah (1) sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan; (2) sektor pertambangan dan penggalian; (3) sektor industri pengolahan; (4) sektor listrik, gas dan air bersih; (5) sektor bangunan; (6) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (7) sektor pengangkutan dan komunikasi; (8) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; (9) sektor jasa-jasa.

Untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah berdasarkan sektor maka dihitung bagaimana dan seberapa besar sumbangan masing-masing sektor tersebut terhadap PDRB dan kemampuan masing-masing sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Sektor yang mampu memberikan sumbangan terbesar dan sekaligus juga sebagai sektor yang dapat melakukan penyerapan tenaga kerja tertinggi, akan menjadi potensi ekonomi unggulan (ekonomi basis) daerah tersebut.

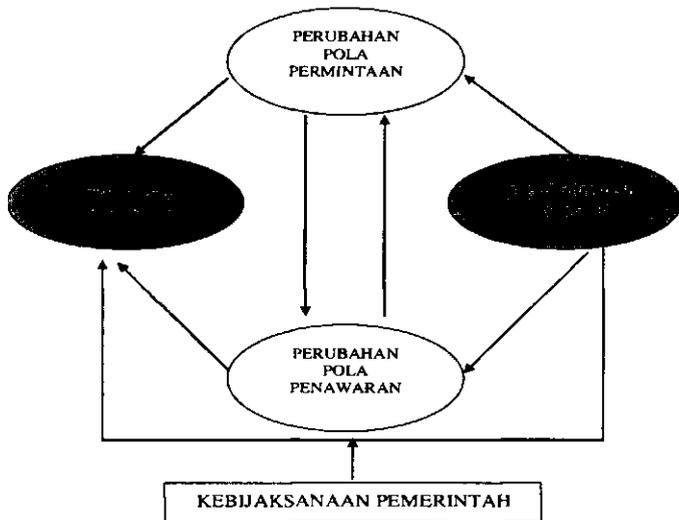
Pertumbuhan masing-masing sektor untuk tingkat provinsi tersebut juga menunjukkan adanya pertumbuhan untuk tingkat kabupaten/kota. Hanya saja analisis pertumbuhan berdasarkan sektor perekonomian itu belum mampu menunjukkan potensi ekonomi secara lebih spesifik yang ada pada suatu daerah. Karena, analisis tentang potensi ekonomi berdasarkan pertumbuhan sektor perekonomian tersebut biasanya baru menghasilkan sektor dan sub sektor yang menjadi ekonomi basis atau unggulan di suatu daerah. Jika dilakukan analisis berdasarkan data *time series* yang cukup panjang, sebenarnya dapat diperoleh sektor atau sub sektor yang benar-benar menjadi ekonomi basis (unggulan) suatu daerah, namun hal itu pun belum menunjukkan bidang usaha dan jenis produk yang menjadi potensi ekonomi daerah itu.

Dari sisi lain, analisisnya juga harus diturunkan ke tingkat bidang usaha dan jenis produk yang dihasilkan oleh sektor atau

sub sektor usaha di daerah. Sehingga untuk sektor pertanian misalnya, akan diperoleh secara jelas tentang potensi ekonomi berdasarkan bidang usaha pertanian dan jenis produk pertanian yang menjadi unggulan dan layak dikembangkan lebih lanjut di daerah. Demikian juga halnya untuk sektor industri, perdagangan dan jasa, akan diketahui bidang usaha industri apa saja dan jenis produk industri apa saja yang menjadi potensi ekonomi di daerah itu. Sehingga pada akhirnya akan diketahui potensi bidang usaha dan jenis produk industri apa saja yang layak dikembangkan di daerah tersebut. Dengan demikian maka kebijakan dan program pembangunan yang akan diterapkan serta dikembangkan di daerah dapat lebih aplikatif dan tepat sasaran. Proses industrialisasi tersebut sebagai sebagai mana terlihat pada Gambar 2.

PERUBAHAN STRUKTUR = f (PERTUMBUHAN EKONOMI)

- a. PERGESERAN POLA PERMINTAAN
- b. PERGESERAN POLA PENAWARAN



PERUBAHAN STRUKTUR = f (PERTUMBUHAN EKONOMI)

PERGESERAN PERMINTAAN = f (PERTUMBUHAN EKONOMI)

PERGESERAN PENAWARAN = f (PERTUMBUHAN EKONOMI)

Gambar 2 : Hubungan antara Perubahan Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi (Isyandi, 1996)

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses industrialisasi tersebut, yakni (a) konsep basis ekonomi daerah; (b) konsep basis sumberdaya; (c) konsep spesialisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Robinson Tarigan, 2004 ; Richardson, 2001; Sadono Sukirno, 2006; Hollis Chenery, 1979) :

1) Konsep Basis Ekonomi Daerah

Konsep basis ekonomi daerah memandang bahwa suatu daerah merupakan sebuah sistem sosial-ekonomi yang terpadu. Kemampuan suatu daerah untuk mengeksport produknya ke luar daerah (luar negeri) akan memicu tumbuhnya efek penggandaan (*multiplier effect*) di daerah itu sendiri. Teori basis ekonomi ini menganggap bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang-barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Model ekonomi basis juga menekankan pendekatan sektoral terhadap pembangunan ekonomi suatu daerah. Pendekatan tersebut memusatkan perhatiannya terhadap transaksi dalam sistem perekonomian suatu daerah yang harus dimaksimalkan oleh perekonomian daerah melalui keterkaitan kelembagaan internal antara sektor publik dengan sektor swasta.

Menurut teori basis ekonomi, struktur perekonomian suatu daerah akan terdiri atas dua sektor, yaitu: *pertama*, sektor basis, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri. Sektor ini sekaligus menunjukkan bahwa daerah secara tak langsung mempunyai kemampuan untuk mengeksport barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain dan ini berarti bahwa sektor tersebut perlu dikembangkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. *Kedua*, sektor non-basis, yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang hanya

ditujukan untuk melayani pasar dalam daerah itu sendiri.

Richardson (2001) menjelaskan bahwa pertumbuhan suatu wilayah adalah fungsi dari penduduk dan tingkat pendapatan daerah belakangnya, sedangkan laju tingkat pertumbuhan tergantung pada laju tingkat permintaan dari daerah belakang atas barang dan jasa atau pelayanan di daerah perkotaan. Teori lain yang menjelaskan tentang perkembangan daerah adalah teori sektor basis ekspor (*export base theory*). Teori ini dirancang untuk menjelaskan bagaimana suatu daerah (kota) tumbuh, dan kemudian mampu mendukung dan mempertahankan pertumbuhan daerahnya. Teori ini dikembangkan oleh banyak ahli. Menurut teori ini, ekonomi perkotaan terdiri atas aktifitas basis dan non basis. Aktifitas basis menghasilkan barang dan jasa untuk diekspor. Aktifitas non basis merupakan aktifitas yang menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi secara lokal. Aktifitas basis merupakan penentu dari pertumbuhan daerah atau perkotaan. Peningkatan dalam aktifitas basis akan mengakibatkan pertumbuhan pendapatan, lapangan kerja dan produksi. Sedangkan penurunan aktifitas basis akan mengakibatkan penurunan total aktifitas ekonomi dan lapangan kerja. Jadi pertumbuhan dari satu daerah perkotaan tergantung pada pertumbuhan aktifitas basisnya. Manfaat utama dari konsep basis ini adalah pada sifatnya yang simpel sehingga merupakan teknik yang berguna bagi analisis pendahuluan dan prediksi.

Teori basis dan non basis merupakan pengembangan dari teori perdagangan (*Comparative advantage*) dari Ricardo dan J.S. Mills, teori-teori lokasi dari Ohlin, Losch dan Isard yang digabungkan dengan teori perkembangan masyarakat (tradisional versus perkotaan) dan Hoyt (Robinson Tarigan, 2004). Teori tersebut menyebutkan daerah basis adalah daerah yang sudah berswasembada dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan disamping itu telah dapat pula mengirim barang, jasa-jasa, modal maupun tenaga ahli ke daerah lain, sehingga daerah basis sering disebut daerah surplus. Sebaliknya daerah yang belum dapat



memenuhi kebutuhan sendiri dan masih mendatangkan barang, jasa-jasa, modal maupun tenaga ahli disebut daerah bukan basis atau sering disebut sebagai daerah minus, dimana kebutuhan daerah minus tersebut disubsidi oleh pemerintah.

2) Konsep Basis Sumberdaya

Pada dasarnya, teori basis sumber daya (*resource base theory*) merupakan perluasan dari teori basis ekonomi dan/atau teori basis ekspor. Dalam analisisnya, teori ini disamping mengakui peranan yang sangat besar dari perkembangan sektor ekspor suatu daerah dalam pembangunan daerah, baik dalam menciptakan pendapatan di sektor tersebut maupun dalam menciptakan efek penggandaan pada perekonomian daerah secara menyeluruh, teori ini juga menekankan analisisnya dalam dua aspek (Sadono Sukirno, 2006), yaitu:

- a) Pentingnya peranan kekayaan alam suatu daerah dalam pembangunan daerah tersebut dalam berbagai tingkat pembangunan ekonominya.
- b) Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya efek pengganda dari sektor ekspor secara menyeluruh pada perekonomian daerah.

Teori basis sumberdaya juga menganalisis mekanisme dari pertumbuhan suatu daerah. Menurut teori ini, pembangunan daerah pada mulanya timbul karena akibat adanya kesanggupan suatu daerah untuk menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh perekonomian nasional dan mengeskpornya dengan harga dan kualitas yang bersaing dengan barang yang sama atau sejenis yang dihasilkan oleh daerah lain. Kesanggupan mengeskpore tersebut, selanjutnya akan menciptakan pendapatan untuk daerah itu sendiri berdasarkan karakteristik yang melekat pada perekonomian daerah serta struktur sosial daerah tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring dengan berkembangnya pasar daerah dan kegiatan ekonomi mampu

menyediakan keperluan daerah, maka akan tercipta keadaan yang mendorong pertumbuhan daerah tangguh secara otomatis (*self-reinforcing*) dan berkembang secara otomatis (*self-sustaining*). Akibatnya, faktor-faktor dari dalam daerah itu menjadi bertambah penting peranannya dalam pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, dengan adanya pertumbuhan yang berkembang secara otomatis, maka terjadilah pergeseran dalam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah dari didominasi sektor ekspor menjadi lebih dipengaruhi oleh efisiensi organisasi produksi di daerah tersebut (Chenery, 1979).

3) Konsep Spesialisasi

Konsep spesialisasi dalam pembangunan regional merupakan suatu konsep pembangunan yang menunjukkan suatu tingkat spesialisasi relatif suatu sektor atau suatu daerah terhadap sektor atau daerah lain. Guna memberikan gambaran yang ideal mengenai tingkat spesialisasi suatu sektor perekonomian, maka dibutuhkan suatu alat analisis yang memadai. Salah satu alat analisis yang dimaksud adalah dengan menggunakan teknik analisis *location quotient* (LQ).

Teknik LQ merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat spesialisasi relatif suatu daerah dalam kategori industri atau sektor (Robinson Tarigan, 2004)). Selain itu pula teknik LQ ini juga merupakan suatu indikator sederhana yang menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di daerah lain. Bila nilai LQ di suatu sektor pembangunan daerah lebih besar dari satu maka sektor yang bersangkutan merupakan sektor kuat, sehingga daerah tersebut secara potensial merupakan pengeksport produk dari sektor tersebut ke daerah lainnya. Sebaliknya bila nilai LQ kurang dari satu, maka daerah tersebut merupakan pengimpor produk sektor tertentu. Dalam aplikasinya teknik LQ dapat digunakan untuk menganalisis potensi perekonomian dari sisi pendapatan domestik dan dari sisi kesempatan kerja di suatu daerah.

C. GAMBARAN PERKEMBANGAN EKONOMI PROVINSI RIAU

Hadirin yang saya hormati,

1. Perkembangan Perekonomian

Pertumbuhan perekonomian propinsi Riau juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain : sumberdaya alam, penduduk, modal dan tidak kalah pentingnya adalah faktor lokasi termasuk struktur kegiatan ekonomi dan bisnis regionalnya. Di samping itu, stimulus jumlah (dana) pembangunan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat secara signifikan juga berpengaruh terhadap perbedaan pendapatan dan jau pertumbuhan ekonomi daerah. Krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997 telah memberikan dampak yang luas terhadap perubahan ekonomi di propinsi Riau. Sebelum terjadinya krisis ekonomi, kegiatan ekonomi dan bisnis di propinsi Riau mengalami pertumbuhan yang tinggi, yakni 8,89 persen pada tahun 1996 dan 9,00 persen pada tahun 1997, selanjutnya mengalami kontraksi sebesar negatif 1,81 persen pada tahun 1998. Namun pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi propinsi Riau meningkat kembali menjadi 4,16 persen. Pada tahun 2000 dan 2001 pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau mengalami perkembangan sebesar 10,24 persen dan 5,15 persen. Selanjutnya pada tahun 2002, 2003 dan 2004 pertumbuhan ekonomi tanpa migas di propinsi Riau mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 7,91 persen, 8,30 persen dan 8,95 persen. Untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada Tabel 4.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa migas pada tahun 1998 sebesar minus 1,81% meningkat menjadi 5,59% pada tahun 2002, sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau per tahun selama periode 1998-2002 mencapai 4,67%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional per tahun yang hanya 0,05% pada periode yang sama. Begitu pula, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan migas pada tahun 1998 sebesar minus 3,86% tumbuh menjadi 4,40% pada

tahun 2002. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan migas per tahun selama periode 1998-2002 mencapai 2,94%. Kondisi ini jauh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional per tahun yaitu minus 0,06% pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi beberapa Provinsi tetangga pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Riau jauh lebih baik, seperti Sumatera Barat (tanpa migas) yang hanya tumbuh rata-rata sebesar 0,57% dan Sumatera Utara (tanpa migas) sebesar 0,54%.

Tabel 4 : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2008

Sektor	Laju Pertumbuhan						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	6,06	6,32	7,00	6,77	5,97	4,84	4,79
2. Pertambangan	12,47	21,51	34,07	3,71	2,91	-0,13	3,93
3. Industri	8,88	9,89	10,14	5,60	6,78	8,63	7,18
4. Listrik	4,66	4,00	10,44	9,20	5,86	5,62	6,86
5. Bangunan	9,57	8,21	9,10	7,15	8,27	11,65	11,14
6. Perdagangan	9,20	10,81	9,37	10,15	11,29	8,94	9,72
7. Angkutan	11,50	11,20	11,85	10,46	8,73	7,28	10,45
8. Keuangan	12,96	12,86	18,92	18,18	9,62	13,33	13,87
9. Jasa-jasa	8,06	6,87	9,06	7,92	9,94	9,71	9,25
PDRB Tanpa Migas	7,91	8,30	8,95	8,54	8,66	8,25	8,06
PDRB Dengan Migas				5,41	5,15	3,41	5,65

Sumber: BPS Provinsi Riau, berbagai tahun penerbitan (2002-2009).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menciptakan kesempatan kerja yang tinggi pula. Faktor ini akan memberikan peluang yang dapat merangsang seseorang untuk memutuskan apakah akan berpartisipasi di pasar kerja. Namun disadari pula bahwa pembangunan yang pesat di samping akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan memberikan tekanan yang besar pada sumberdaya alam dan

daya dukung lingkungan hidup. Tidak mustahil, sumberdaya alam dan lingkungan hidup akhirnya tidak mampu untuk memberikan kontribusinya dalam pembangunan, bahkan sebaliknya menjadi rusak dan hancur. Apabila sumberdaya alam dan lingkungan hidup sudah rusak, maka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan juga akan menurun drastis. Kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan adalah pilihan yang tepat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah.

Di samping itu, PDRB prpropinsi Riau merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis. Pada Tabel 5 disajikan PDRB Provinsi Riau Tahun 2004-2008 berdasarkan harga konstan Tahun 2000.

Tabel 5 : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tanpa Migas Tahun 2004 – 2008 (Dalam Jutaan Rupiah)

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	12.464.887,42	13,308,660.62	14,103,047.84	14,785,911.40	15,494,292.46
2. Pertambangan & Penggalian	316.532,74	43,906,875.82	45183667.56	45,125,692.40	46,897,464.66
3. Industri Pengolahan	5.230.451,01	7,972,127.07	8.512.386.69	9,246,973.72	9,910,769.31
4. Listrik, Gas dan Air minum	135.714,73	165,499.00	175.200.34	185,050.79	197,745.09
5. Bangunan	1.987.673.82	2,212,679.83	2,395.732.42	2,674,930.31	2,972,880.21
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	5.121.976.81	5,641,815.35	6,278,665.89	6,840,260.85	7,504,882.30
7. Pengangkutan & Komunikasi	1.794.891.88	1,982,655.81	2,173,442.62	2,331,648.28	2,575,353.68
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	653.130.59	771,841.96	892,826.89	1,011,841.54	1,149,980.23
9. Jasa-Jasa	3.081.363.13	3,325,431.29	3,655,897.19	4,010,950.18	4,382,013.88
PDRB	30.786.622.12	33,516,541.66	36,417,633.12	39,420,760.09	42,596,930.48

Sumber : BPS Provinsi Riau, Riau Dalam Angka, berbagai tahun penerbitan, diolah.

Angka-angka dalam PDRB propinsi Riau di atas, menggambarkan kemampuan daerah ini dalam mengelola sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta teknologi yang dimilikinya. Oleh sebab itu PDRB yang dihasilkan oleh propinsi Riau sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam yang ada, ketersediaan tenaga terdidik, optimalisasi penggunaan barang-barang modal serta dana yang tersedia dalam menciptakan produksi barang dan jasa. Adanya keterbatasan kemampuan dalam mengelola faktor-faktor tersebut di atas akan menyebabkan lambatnya pembangunan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran dan membesarnya penduduk miskin di propinsi Riau.

Perkembangan PDRB propinsi Riau tanpa migas atas dasar harga konstan Tahun 2000 yang dikaitkan dengan jumlah investasi dan ekspor sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel-6 dibawah ini.

Tabel 6 : Perkembangan PDRB, Investasi Dan Ekspor Di Provinsi Riau Tanpa Migas Tahun 1980-2003

TAHUN	PDRB (Juta Rp)	PMA (Ribu USD)	PMDN (Juta Rupiah)	EKSPOR (Ribu USD)
1980	231,803.50	4,351,875.00	52,031,129.73	7,936,372.60
1985	1,071,509.33	14,249,717.00	128,148,224.00	4,816,693.60
1990	1,572,292.40	20,515.00	5,736,112.80	5,185,528.20
1995	7,211,638.71	5,205,491.89	4,669,466.24	7,360,464.80
2000	9,649,875.59	2,391,545.40	8,454,421.39	11.012.225.22
2001	10.146.823.25	2,354,204.00	5.740.533.00	8.977.065.96
2002	10,714,356.29	1,395,358.90	2,799,092.00	9.306.856.60
2003	11.382.802.83	1,153,020,00	668,888.00	9.895.362.15

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, diolah, berbagai tahun penerbitan

Pada tahun 1980 jumlah PDRB propinsi Riau tanpa migas menurut lapangan usaha sebesar Rp.231.803,50 juta, dan pada tahun 1985, 1990 dan 1995 jumlah PDRB propinsi Riau secara berturut-turut mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.1.071.509,33 juta; Rp.1.572.292,40 juta dan Rp.7.211.638,71 juta. Pada tahun 2000 jumlah PDRB Provinsi Riau kembali mengalami peningkatan yakni Rp.9.650.222,77 selanjutnya pada tahun 2003 telah berubah menjadi Rp.11.382.802,83 yang dihitung menurut harga konstan tahun 1993.

Krisis ekonomi telah menyebabkan terjadi perubahan struktural dalam perekonomian Provinsi Riau. Ekspor propinsi Riau tahun 1990 sebesar USD 5,185,528,20 ribu meningkat menjadi USD 11,012,225,22 ribu pada tahun 2000 namun turun menjadi USD 9,895.362,15 ribu pada tahun 2003. Fluktuasi ini lebih cenderung disebabkan oleh akumulasi yang menyangkut proses permintaan sumberdaya produksi untuk meningkatkan kemampuan berproduksi. Hal ini menunjukkan hasil kemajuan yang berarti yang disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi daerah dari sumbangan sektor industri terhadap PDRB :

Perkembangan jumlah investasi selama 25 tahun terakhir, Provinsi Riau menempati urutan nomor 5 di Indonesia untuk penanaman modal asing (PMA). Pada tahun 1990 PMA di Provinsi Riau tercatat sebesar USD 20.515 ribu, kemudian naik menjadi USD.2.391.545,40 ribu, selanjutnya pada tahun 2003 sebesar 1.153.020 ribu. Demikian juga dengan PMDN, pada tahun 1990 tercatat sebesar Rp.5.736.112,80 juta, kemudian naik menjadi Rp. 8.454.421,39 juta pada tahun 2000, sedangkan pada tahun 2003 turun menjadi 668.888 juta. Faktor-faktor ini menyebabkan pendapatan regional per kapita propinsi Riau, relatif cukup tinggi yaitu Rp.4.087.451,00 pada tahun 1999 meloncat menjadi Rp. 6.638.010,15 pada tahun 2004. Artinya, pada krisis ekonomi meningkatnya pendapatan per kapita masih juga ada, walaupun terserap oleh besar inflasi sehingga kemampuan daya beli menjadi turun drastis.

Neraca perdagangan luar negeri Provinsi Riau selama periode 2005-2007 mengalami surplus yang cenderung meningkat. Pada tahun 2005 surplus tersebut senilai US \$6.380,0 juta meningkat menjadi US \$8.032,7 juta pada tahun 2006, kemudian meningkat lagi sebesar 26,9% menjadi US \$10.190,9 juta pada tahun 2007. Surplus neraca perdagangan luar negeri yang biasanya terjadi lebih besar didukung oleh surplus komunitas migas, namun pada tahun 2007 surplus komoditas nonmigas justru lebih dominan. Senarnya, surplus non-migas tersebut telah meningkat sejak tahun 2005. Nilai surplus komunitas non-migas sebesar US \$3.698,3 juta pada tahun 2006 kemudian meningkat menjadi sebesar US \$ 5.502,2 juta atau 48,77 persen pada tahun 2007.

Bila diamati lebih dalam, ekspor Provinsi Riau tahun 2007 mengalami kenaikan sekitar 27,4 persen, yaitu dari US \$8.694,7 juta menjadi US \$11.080,5 Juta sedangkan impor Provinsi Riau juga mengalami kenaikan sebesar 34,4 persen. Akan tetapi secara nominal impor tersebut hanya meningkat sebesar US \$227,6 juta, masih jauh lebih rendah dibanding ekspor yang secara nominal meningkat sebesar US \$ 2.385,8 juta. Selengkapny dapat tergambar melalui tabel 7. Peningkatan tersebut diuktu oleh peningkatan sebagian besar komoditasnya, namun dari sepuluh komoditas utama ekspor tahun 2007 yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan tersebut, tidak ada satupun komoditas yang berasal dari sektor primer (sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian)

Tabel 7 : Perdagangan Luar Negeri Riau, 2005-2007 (juta US\$)

Tahun	2005	2006*	2007
Ekspor	7.024,8	8.694,7	11.080,5
a. Migas	3.881,9	4.430,2	4.694,1
b. Non Migas	3.142,9	4.264,5	6.311,8
Impor	644,8	662,0	889,6
a. Migas	223,7	95,8	80,0
b. Non Migas	421,1	566,2	809,6
Surplus/defisit	6.380,0	8.037,7	10.190,9
a. Migas	3.658,2	4.334,4	4.614,1
b. Non Migas	2.721,8	3.698,3	5.502,2

Sumber : BPS, BAPPEDA Provinsi Riau, berbagai penerbitan (diolah).

Serangkaian faktor yang khusus melekat dalam perekonomian propinsi Riau antara lain: (a) Permintaan tenaga kerja meningkat dengan lebih pesat di kawasan kota, sedangkan pertambahan tenaga kerja berlangsung di daerah pedesaan, (b) Kurang lancarnya mobilitas antar sektor dari tenaga kerja berkaitan dengan tingkat keterampilan atau pendidikan, (c) Selain dari itu juga tidak adanya akses yang sama untuk mendapatkan modal dan tanah yang baik, (d) Investasi dan penerapan teknologi diutamakan di bidang modern dalam masing-masing sektor.

Dalam menyelesaikan fenomena pembangunan provinsi Riau sebagaimana dijelaskan di atas, ilmu ekonomi pembangunan menawarkan teori top-down dan bottom up. Akan tetapi konsep pembangunan top-down dan bottom up tidaklah terlalu berhasil di NSB. Sebagai alternatif dikembangkan suatu konsep pembangunan wilayah dengan pendekatan konsep *pembangunan ekonomi lokal (local economics development)* Konsep ini beranggapan bahwa pengembangan daerah sangat ditentukan oleh tumbuh kembangnya wiraswasta lokal yang ditopang oleh kelembagaan-kelembagaan di daerah tersebut meliputi : industri, universitas, asosiasi kegiatan usaha, pemerintah daerah, pengusaha lokal dan lainnya (Blakely, 1987, 13) Secara singkat, terdapat fenomena ganda yang tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan daerah saat ini yaitu keterkaitan daerah dengan dinamika ekonomi global pada satu

sisi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses pembangunan wilayah pada sisi lain.

Local Economic Resource Development (LERD) diartikan sebagai penumbuhan suatu lokalitas secara sosial ekonomi dengan lebih mandiri, berdasarkan potensi-potensi yang dimilikinya, baik sumber daya alam, geografis, kelembagaan, kewiraswastaan, pendidikan tinggi, asosiasi profesi maupun lainnya (Firman, 1999) Konsep dasar LERD adalah suatu proses dimana pemerintah setempat (local governments) mengatur sumber-sumber daya setempat dan menciptakan pola kemitraan dengan sektor swasta atau sektor publik untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan merangsang aktivitas ekonomi pada suatu wilayah ekonomi (Blakely, 1989: 13). Berbeda dengan paradigma konvensional pengembangan daerah sebelumnya yang berorientasi pada output dan blue print, LERD cenderung berorientasi pada proses.

Secara lebih spesifik, LERD adalah bagaimana merumuskan proses pembangunan wilayah dengan melibatkan institusi pemerintah dan swasta, pengembangan industri alternatif peningkatan keterampilan dan inovasi tenaga kerja lokal, transfer pengetahuan dan identifikasi pasar-pasar baru (Blakely, 1989, 59). Pada sisi demand LERD berupaya meningkatkan jumlah dan variasi lapangan kerja sedangkan pada sisi supply berupaya memberikan kemampuan dan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat lokal terhadap sumber-sumber ekonomi.

Dalam sistem kelembagaan pemerintah, LERD cenderung mendorong proses desentralisasi dengan memberikan otonomi Dengan mempelajari basis ekonomi, mempelajari hambatan untuk tumbuh dan investasi, dan dengan merencana program dan proyek secara strategis untuk mengatasi hambatan dan memfasilitasi investasi, masyarakat dapat mengembangkan basis ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan di daerahnya. Untuk melihat potensi *capital social* di provinsi Riau, Tabel 8, memperlihatkan kinerja indikator sosial kependudukan provinsi Riau.

Tabel 8 : Indikator Sosial Kependudukan Provinsi Riau Tahun 2004-2008

No	Indikator	2004	2005	2006	2007	2008
1	Penduduk (total) :		4.938.900	4.953.000	5.071.000	5.189.100
	Laki-Laki		2.662.000	2.619.600	2.678.100	2.735.800
	Perempuan		2.273.900	2.333.400	2.392.900	2.453.300
2	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)		54,24	55,56	56,88	58,21
3	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)			2,42	2,38	2,33
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,20	73,60	73,81	74,63	
5	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	15,3	12,2	10,2	9,79	8,20
6	Penduduk Usia Kerja	3.384.397	4.176.923	3.312.427	3.380.689	3.584.090
7	Angkatan Kerja	2.390.600	2.530.789	1.975.684	2.115.084	2.239.388
8	Tingkat Kemiskinan (%)	14,67	12,51	11,86	11,20	10,63
9	Pendidikan :					
	Tidak Tamat SD	24,49	22,88	23,83	24,00	
	SD	30,43	33,77	30,67	29,60	
	SMP/ Sederajat	21,01	30,03	19,55	19,88	
	SMA/ Sederajat	20,92	19,35	21,92	21,40	
	Diploma III/ ke atas	3,15	3,96	4,03	5,38	

Sumber : BPS dan BAPPEDA Provinsi Riau 2009, diolah

D. TINJAUAN TEORITIS : PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERUBAHAN STRUKTUR

Hadirin yang saya muliakan,

Pertumbuhan Seimbang dan Pertumbuhan Tidak Seimbang serta Indeks Ketidakeimbangan.

Sasaran yang hendak di capai melalui pelaksanaan pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi adalah struktur ekonomi yang seimbang yang memperlihatkan kemampuan dan kekuatan industri maju yang didukung dengan kekuatan dan kemampuan pertanian yang serasi. Dalam mencapai struktur ekonomi yang seimbang tersebut diperlukan perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi sehingga produksi yang berasal dari sektor-sektor di luar

Pertanian merupakan bagian yang semakin besar karena sektor industri menjadi tulang punggung ekonomi. Struktur ekonomi yang kokoh dan keterkaitan yang meluas akan membuka kesempatan kerja, baik di sektor industri manufaktur maupun di sektor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi pembangunan dan kebijakan pertumbuhan ekonomi dalam mendorong dan mempercepat proses industrialisasi tersebut. Strategi pembangunan itu adalah pembangunan seimbang atau pembangunan tak seimbang.

Teori pertumbuhan seimbang mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis diberbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor tumbuh bersama. Untuk itu, diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi penawaran memberikan tekanan pada pembangunan serentak di semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi meningkatkan penawaran barang. Sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar dan peningkatan pendapatan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh (Isyandi, 1996).

Pembangunan seimbang biasanya dilaksanakan dengan maksud untuk menjaga agar proses pertumbuhan tidak mengalami hambatan-hambatan dalam (a) memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber'(air dan listrik) dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil produksi ke pasar; (b) memperoleh pasar barang-barang yang telah dan akan diproduksi. Dengan demikian, pertumbuhan seimbang diartikan sebagai usaha pertumbuhan yang berupaya untuk mengatur program investasi sedemikian rupa sehingga sepanjang proses pertumbuhan tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari penawaran atau permintaan.

Dalam melaksanakan pertumbuhan seimbang, tingkat investasi yang harus dilakukan besarnya jauh melebihi tingkat investasi yang dilakukan pada sebelum usaha pertumbuhan ekonomi dilakukan. Oleh karena itu, strategi pertumbuhan seimbang disebut pula big push theory. Tujuan utama strategi

ini adalah untuk menciptakan berbagai jenis industri yang berkaitan erat satu sama lain sehingga setiap industri akan memperoleh eksternalitas ekonomi sebagai akibat dari industrialisasi tersebut. Jika suatu industri memperoleh eksternalitas ekonomi, biaya produksinya dapat diturunkan dan industri tersebut dapat melaksanakan kegiatannya dengan lebih efisien.

Menurut Rosenstein-Rodan (1953 dalam Sadono Sukirno, 2006), pembangunan industri secara besar-besaran akan menciptakan tiga macam eksternalitas ekonomi, yaitu (1) yang diakibatkan oleh perluasan pasar; (2) karena industri yang sama letaknya berdekatan; dan (3) karena adanya industri lain dalam perekonomian tersebut. Nurkse (1953) dalam analisisnya menekankan bahwa pembangunan ekonomi bukan saja mengalami kesukaran dalam mendapatkan modal yang dibutuhkan, tetapi juga dalam mendapatkan pasar bagi barang-barang industri yang dikembangkan. Nurkse mengatakan bahwa investasi yang sangat rendah disebabkan kecilnya daya beli masyarakat sedangkan rendahnya daya beli itu disebabkan oleh rendahnya pendapatan riil masyarakat dan keadaan ini disebabkan pula oleh rendahnya produktivitas.

Menurut Nurkse (1953), faktor yang terpenting dalam menentukan luasnya pasar adalah tingkat produktivitas. Untuk suatu perekonomian yang mempunyai sejumlah penduduk tertentu, jumlah barang-barang yang dapat dihasilkan dan dijual dalam jangka waktu tertentu tergantung kepada tingkat penggunaan modal dalam proses produksi. Dalam perekonomian yang pasarnya sangat terbatas tidak ada rangsangan bagi pengusaha untuk menggunakan alat-alat yang modern. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pasar telah membatasi penggunaan modal sehingga membatasi pula kemampuan perekonomian untuk menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu konsep Nurkse mengenai keseimbangan menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi dihitung melalui sejumlah perubahan

Pada komposisi keluaran sektoral. Jumlah perubahan yang diperhitungkan itu akan diberikan oleh perbedaan-perbedaan sektoral dalam koefisien pendapatan seperti yang dijelaskan Chenery.

Lewis (1957) juga melengkapi analisisnya tentang perlunya pembangunan yang seimbang yang ditekankan Pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor pertanian dan sektor dustri, serta antara sektor dalam negeri dan luar negeri. lanjutnya, Lewis (1957) mengatakan bahwa akan timbul banyak salah jika usaha pembangunan hanya dipusatkan Pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan timbul adanya ketidak-stabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan terhambat.

Lewis (1957) juga menunjukkan pentingnya upaya pembangunan yang menjamin adanya keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian. Jika di sektor pertanian terjadi inovasi dalam teknologi produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik, implikasinya yang mungkin timbul adalah (a) terdapat surplus di sektor pertanian yang dapat di jual di sektor non pertanian; (b) produksi tidak bertambah, berarti yang digunakan berkurang. Oleh sebab itu jumlah bertambah tinggi; (c) kombinasi dari kedua keadaan tersebut.

Jika sektor industri mengalami perkembangan yang pesat, sektor tersebut akan menyerap kelebihan produksi bahan pangan dan kelebihan tenaga kerja. Tanpa adanya perkembangan di sektor industri, nilai tukar (*terms of trade*) sektor pertanian akan memburuk sebagai akibat dari kelebihan produksi. Hal ini akan menimbulkan akibat depresif terhadap pendapatan disektor pertanian. Oleh karena, itu di sektor pertanian tidak terdapat lagi perangsang untuk mengadakan investasi baru dan inovasi.

Menurut Hirschman, Streeten, Singer, dan Flaming, strategi

pertumbuhan seimbang sangat sulit dilakukan di negara sedang berkembang yang biasanya mempunyai sumber daya yang terbatas Hirschman menggolongkan Roesenstein-Rodan dan Nurkse pada teori pembangunan seimbang yang menekankan segi permintaan, Sedangkan Citovsky dan Lewis pada teori pembangunan seimbang yang menekankan segi penawaran.

Singer dan Fleming mengemukakan strategi pertumbuhan tak-seimbang. Pertumbuhan merupakan keadaan yang berlawanan dengan keadaan pada pertumbuhan seimbang. Istilah ini digunakan untuk menyatakan program pertumbuhan disusun sedemikian rupa sehingga dalam perekonomian tersebut akan timbul kelebihan (surplus) dan kekurangan (shortage) dalam berbagai sektor sehingga menimbulkan distorsi-distorsi dan ketidakstabilan dalam perekonomian.

Menurut Hirschman (1958, dalam Sadono Sukirno, 2006), strategi pertumbuhan seimbang melupakan kenyataan historis yang menunjukkan bahwa secara gradual kegiatan industri modern telah mulai berkembang pada masa lalu dan telah sanggup menggantikan industri rumah tangga atau menghasilkan barang-barang yang pada mulanya diimpor. Strategi ini juga mengabaikan kenyataan sejarah yang menunjukkan bahwa hasil industri modern dapat mengakibatkan kenaikan pengeluaran masyarakat sehingga mengurangi tabungan mereka serta mendorong untuk bekerja lebih giat. Hirschman tidak yakin bahwa negara sedang berkembang sanggup melaksanakan program pertumbuhan yang demikian tanpa adanya bantuan dari luar negeri. Karena pelaksanaan pembangunan seperti itu memerlukan modal dan tenaga ahli yang besar sekali jumlahnya. Hirschman juga menyatakan bahwa jika suatu negara mampu untuk melaksanakan pertumbuhan seimbang, negara itu bukan lagi negara sedang berkembang. Oleh karena itu, Hirschman dan Streeten menawarkan strategi pertumbuhan takseimbang. Strategi pertumbuhan takseimbang adalah suatu pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pertumbuhan di

negara sedang berkembang. Hirschman menambahkan bahwa pola pertumbuhan takseimbang adalah berdasarkan pertimbangan (1) secara historis pertumbuhan ekonomi yang terjadi coraknya takseimbang; (2) untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia; dan (3) pertumbuhan takseimbang akan menimbulkan ketidakseimbangan (bottlenecks) atau gangguan-gangguan dalam proses pertumbuhan yang akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan selanjutnya.

Strategi pertumbuhan tak-seimbangan juga dianggap lebih sesuai untuk dilaksanakan di negara sedang berkembang karena menghadapi kekurangan sumber daya. Dengan melaksanakan strategi pertumbuhan takseimbang, usaha pembangunan pada periode tertentu dapat dipusatkan pada beberapa sektor yang akan mendorong investasi yang ikut (induced investment) di berbagai sektor pada periode berikutnya. Dengan demikian, sumber daya yang sangat langkayang tersedia dapat digunakan secara lebih efisien pada setiap tahap pembangunan.

Samuelson dan Solow (1953 dalam Jhingan, 1990)) membuat rumusan tentang pengertian pertumbuhan yang seimbang (balanced growth) dengan mengacu pada tingkat pertumbuhan sektoral. Rumusan ini mengemukakan bahwa.

The output of each commodity increases or decreases by a constant percentage per unit of time, the mutual proportion in which commodities are produced remaining constant. The economy changes only in scale, but not in composition (Solow and Samuelson, 1953)

Gagasan mengenai laju pertumbuhan sektoral yang konstan ini mengarah pada ukuran dispersi pertumbuhan sektoral sekitar laju pertumbuhan keseluruhan selama waktu tertentu. Ukuran dispersi ini merupakan koefisien variasi tipe Person sebagai berikut :

$$S = 1 / g \sqrt{1/n \epsilon (g_i - G)^2}$$

Keterangan : S = indeks pertumbuhan seimbang

G = laju pertumbuhan PDB

N = jumlah sektor (primer, manufaktur dan jasa)

g_i = laju pertumbuhan nilai tambah bruto sektor ke - i

Indeks ketidak seimbangan (imbalance index) Yotopoulos dan Lau (1970) dapat didefinisikan, yaitu yang berkenaan adanya penyimpangan (dispersion) dari keseimbangan, dan keadaan tersebut harus mengangsur dua unsur, yaitu : (1) penyimpangan tingkat pertumbuhan sektoral yang mengelilingi tingkat pertumbuhan seluruhnya dalam periode tertentu (pengertian Samuelson-Solow), (2) bobot sektoral yang dapat mencerminkan elastisitas pendapatan dari komposisi sektoral (pengertian Nurkse-Chenery). Unsur ketiga yang juga harus dimasukkan agar sesuai dengan kriteria sifat konseptual, yaitu : (3) kontribusi yang relatif dari setiap sektor dalam perekonomian.

Berdasarkan formulasi tersebut, Yotopoulos dan Nugent membuat definisi index imbalanced. Yotopoulos dan Nugent (1976) memberikan rumusan tentang pengertian pertumbuhan yang seimbang dengan mengkombinasikan elemen-elemen pada teori pertumbuhan dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi. Dengan perkataan lain, setiap sektor tumbuh melalui jalur perluasan (*expansion path*) yang di tentukan oleh elastisitas pendapatan konsumen. Inilah arti kuantitatif *balanced growth*. Yang sesungguhnya, Yotopoulos dan Nugent memasukkan bobot sektoral (W_i) dalam formulasi indeksnya sebagai berikut :

$$V = 1 / G \sqrt{\epsilon w_i (g_i - b_i G)^2}$$

Keterangan :

V = indeks pertumbuhan takseimbang (*index imbalanced*).

G = tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam periode tertentu

g_i = tingkat pertumbuhan sektor,

b_i = simbol yang dipakai Nurkes tentang balanced yang setara dengan pengertian *Chenery tentang income elasticity of sectoral composition*, (lihat nilai b_i pada persamaan -7)

w_i = sumbangan sektoral ke - i ; keterangan ϵw_i

Dari notasi di atas terlihat jarak pertumbuhan yang di ukur adalah perbedaan tingkat pertumbuhan sektor (g_i) dengan tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi setelah dimasukkan bobot sektoral yang mencerminkan elastisitas pendapatan sektoral ($b_i G$) dengan memasukkan bobot sektoral (kontribusi relatif) setiap sektor tingkat penyimpangan yang tinggi pada tingkat pertumbuhan sektoral dari tingkat pertumbuhan ekonomi keseluruhan dapat diartikan sebagai *index imbalanced* yang tinggi. Sebaliknya suatu hubungan yang positif di antara *index imbalanced* dan tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan *index imbalanced* yang rendah.

Untuk mengukur hubungan antara *index imbalanced* dengan tingkat pertumbuhan ekonomi digunakan pengujian korelasi rank Spearman (r_s) yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Keterangan : r_s = koefisien korelasi Spearman
 d_i = perbedaan nilai antara variabel V dan G
 n = ukuran sampel

Pengujian *index balanced* dan *imbalanced* tersebut akan menghasilkan suatu gambaran hubungan antara indeks – indeks tersebut dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita. Hal ini selanjutnya memberikan petunjuk tentang strategi pembangunan dan kebijakan pertumbuhan yang dilaksanakan oleh suatu negara / regional untuk periode waktu tertentu.

E. PERTUMBUHAN SEKTORAL PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU

Hadirin yang saya hormati,

Secara makro, potensi ekonomi daerah biasanya juga menjadi salah satu indikator daya saing daerah tersebut (Isyandi, 2005). Hal itu karena potensi ekonomi suatu daerah akan ikut membentuk kompleksitas daya saing daerah. Keunggulan daya saing suatu daerah akan tercipta jika daerah tersebut memiliki kompetensi inti (*core competence*) yang dapat dibedakan dari wilayah lainnya. Kompetensi inti dapat diwujudkan melalui *create factor*, yaitu upaya menciptakan berbagai faktor produksi yang bisa mendatangkan prestasi yang lebih baik.

Potensi ekonomi daerah tersebut merupakan modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi, industri, investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pangsa pasar bagi produk-produk industri, pertanian dan jasa. Potensi ekonomi suatu daerah juga akan menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kemampuannya dalam penyerapan investasi, tenaga kerja, barang, jasa, dan tabungan.

Indikator potensi ekonomi suatu daerah dapat diukur

berdasarkan kinerja sektor perekonomian, biasanya dibagi ke dalam (9) sembilan sektor yang terdapat dalam PDRB daerah tersebut. Sembilan sektor tersebut adalah, sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa.

PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam perekonomian tersebut.

Besarnya PDRB dapat menunjukkan beberapa hal penting dalam sebuah perekonomian yaitu (Samuelson, Nordhaus, 1995) :

- a. Merupakan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian digunakan untuk memproduksi barang dan jasa
- b. Merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu daerah atau negara
- c. Merupakan gambaran awal tentang masalah struktural (mendasar) yang dihadapi suatu perekonomian. Jika sebahagian besar PDRB berasal dari sektor pertanian, maka perekonomian itu berhadapan dengan ketimpangan struktur produksi, untuk itu perekonomian harus segera memodernisasikan dirinya dengan memperkuat sektor industrinya.

E.1. Gambaran Nilai PDRB Kabupaten di Provinsi Riau

Setiap Kabupaten dan Kota mempunyai potensi dan keunggulan sumber daya yang berbeda, sehingga menghasilkan gambaran kemampuan yang berbeda pula, khususnya yang berkaitan dengan kondisi perekonomian

daerah, yang tercermin salah satunya melalui Nilai PDRB masing-masing kota dan Kabupaten tersebut

PDRB terbesar dimiliki oleh kabupaten Bengkalis, hal ini disebabkan Bengkalis sejak lama mempunyai sumber daya alam minyak dan gas terbesar, kemudian disusul oleh kabupaten Siak yang merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis (pada tahun 1999) yang kaya akan sumber mineral minyak dan gas serta peninggalan sejarah Istana Siak. Selain kekayaan migas kabupaten Siak juga mempunyai potensi pertanian khususnya sub sektor perkebunan dengan komoditi unggulan kelapa sawit, dan ditunjang industri pengolahan kertas dan lain-lain yang menunjang hasil produksi daerah (PDRB) tersebut, yang sebagian juga komoditi yang memberikan kontribusi ekspor yang cukup besar. Kemudian diikuti oleh kabupaten Rokan Hilir dengan letak geografisnya yang berdekatan dengan negara tetangga Malaysia, membuat daerah ini sebagai daerah transit dan perdagangan antar pulau dan antar negara yang menyebabkan sektor keuangan juga berkembang, demikian pula sektor jasa.

Berikut gambaran tentang nilai PDRB kabupaten dan Kota di Provinsi Riau :

Tabel 9 : Perkembangan PDRB Kabupaten dan Kota Di Provinsi Riau Tahun 2005- 2008 (Juta Rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun			
		2005	2006	2007	2008
1	Kuansing	2.119.091,21	2.306.236,82	2.511.608,96	2.718.998,77
2	Indragiri Hulu	3.030.169,59	3.245.331,27	3.469.108,22	3.722.816,19
3	Indragiri Hilir	4.654.045,18	5.023.420,87	5.416.154,25	5.846.659,07
4	Pelalawan	2.325.917,36	2.500.942,71	2.670.775,22	2.856.946,95
5	Siak	14.028.230,35	14.567.279,29	14.748.096,91	15.416.737,55
6	Kampar	7.251.647,68	7.563.362,66	7.827.594,75	8.279.263,32
7	Rohul	1.995.598,46	2.132.572,02	2.271.851,09	2.426.330,44
8	Bengkalis	24.222.298,89	25.161.093,53	25.313.723,74	26.394.553,38
9	Rohil	10.201.672,10	10.581.305,84	10.796.848,05	11.336.110,22
10	Pekanbaru	5.780.933,15	6.367.596,81	6.997.154,88	7.630.422,50
11	Dumai	2.958.220,29	3.091.001,17	3.303.147,41	3.474.178,79
12	Total Kab/ Kota	78.567.824,27	82.540.142,99	85.326.063,49	90.103.017,19
13	Provinsi	79.287.586,75	83.370.867,24	86.213.259,46	91.085.381,81

Sumber : BPS Kabupaten / Kota se Provinsi Riau, beberapa edisi

PDRB terkecil dimiliki oleh kabupaten Kuansing, yang merupakan salah satu kota hasil pemekaran dari kabupaten Kampar (pada tahun 1999) yang juga terkenal dengan kandungan batubara dan mineral serta *pariwisata Pacu Jalur*, dan kabupaten Kuantan Singingi juga merupakan daerah transit, sehingga basis daerah ini masih dominan bertumpu pada sektor angkutan dan komunikasi serta SDM yang masih relatif rendah, kemudian disusul oleh kabupaten Rokan Hulu yang bertumpu pada sektor pertanian terutama sektor perkebunan dengan komoditi unggulan kelapa sawit dan karet, namun komoditi tersebut lebih banyak dimiliki oleh perusahaan besar swasta dan BUMN yang hanya menyumbang sebagian kecil saja terhadap PDRB kabupaten tersebut. Sementara Kabupaten Pelalawan masih mempunyai PDRB yang kecil, karena kabupaten ini masih bertumpu pada sektor pertanian yang tradisional dan turun temurun, dan masyarakat masih dengan struktur yang terpolarisasi walaupun di kabupaten ini telah berdiri industri pulp dan kertas PT.RAPP dan PT. RAK.

E.2 Gambaran Kontribusi Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten

Kontribusi masing-masing sektor ekonomi sebagaimana tersebut di atas menggambarkan struktur ekonomi daerah tersebut, karena dengan mengetahui kontribusi sektor tersebut, maka bisa dilihat tingkat industrialisasi suatu daerah atau negara. Bank Dunia menetapkan kriteria sebagai berikut :

- a. Non industrialisasi, jika sumbangan sektor industri manufaktur terhadap PDB kurang dari 10 persen
- b. Menuju proses industrialisasi, jika sumbangan sektor industri berkisar antara 10 hingga 20 persen terhadap PDB suatu daerah.
- c. Semi industrialisasi, jika sumbangan sektor industri manufaktur antara 20 hingga 30 persen
- d. Industrialisasi penuh, jika sumbangan sektor industri manufaktur terhadap PDB suatu daerah di atas 30 persen.

Untuk mengetahui potensi ekonomi suatu daerah berdasarkan sektor maka dihitung bagaimana dan seberapa besar sumbangan masing-masing sektor tersebut terhadap PDRB dan kemampuan masing-masing sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Sektor yang mampu memberikan sumbangan terbesar dan sekaligus juga sebagai sektor yang dapat melakukan penyerapan tenaga kerja tertinggi, akan menjadi potensi ekonomi unggulan (ekonomi basis) daerah tersebut.

Selanjutnya dicoba pula untuk menggambarkan kondisi masing-masing sektor terhadap PDRB daerah yang menggambarkan struktur ekonomi masing-masing Kabupaten Kota di Provinsi Riau.

Berdasarkan kontribusi sektor terlihat bahwa masing-masing daerah mempunyai struktur ekonomi yang berbeda-beda. Kota Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi Riau, kota perdagangan, pusat pemerintahan, pusat aktivitas ekonomi. Hal ini terlihat dari kontribusi terbesar dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa, dan sektor bangunan (terutama pertokoan-pertokoan). Faktor ini didorong oleh pesatnya perkembangan sektor-sektor tersebut. Pesatnya investasi di bidang tersebut menyebabkan kota Pekanbaru memperoleh anugerah penghargaan 'investasi award' dari BPI, karena dengan iklim investasi yang kondusif yang diciptakan sehingga memotivasi datangnya investor untuk menanamkan investasinya di kota Pekanbaru.

Kota Dumai merupakan kabupaten yang baru terbentuk hasil pemekaran dari kabupaten Bengkalis (pada tahun 1999) dengan jumlah penduduk terkecil di provinsi Riau. Kota ini merupakan kota yang terkenal dengan pelabuhan lautnya dan sebagai transit antar pulau dan negara tetangga, sehingga tidak mengherankan jika kontribusi terbesar berada di sektor perdagangan, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten berbasis pertanian (khususnya sub sektor perikanan), di samping sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini disebabkan wilayahnya yang berada di posisi strategis dengan negara tetangga

Malaysia, sehingga arus lalu lintas perdagangan cukup berkembang dengan pesat. Demikian pula dengan wilayah perairannya yang menyebabkan kabupaten ini berpotensi dalam hasil perikananannya.

Selanjutnya, Kabupaten Siak adalah kabupaten yang berbasis industri pengolahan, dan pertanian. Oleh karena itu sumbangan kedua sektor tersebut terbesar terhadap PDRB, namun industri yang berkembang adalah industri besar yang terfokus pada perkayuan, dan kertas. Sementara pada sektor pertanian adalah sub sektor perkebunan seperti kelapa sawit.

Di sisi lain, Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kampar, dan Pelalawan, mempunyai basis di sektor pertanian. Namun pertanian yang menjadi basis adalah berbeda-beda dalam setiap kabupaten tersebut, seperti : Rokan Hilir dan Rokan Hulu bergerak di sub sektor perkebunan, yaitu kelapa sawit dan karet sebagai produk unggulan.

Sementara Indragiri Hilir lebih dominan di sub sektor perkebunan dengan produk unggulan adalah kelapa yaitu melalui pengolahan kelapa tersebut menjadi komoditi lainnya seperti minyak kelapa, nata decoco, tepung kelapa (untuk perusahaan besar), kopra dan gula kelapa, meubel yang bahan bakunya dari pohon kelapa (usaha yang dikelola masyarakat), walaupun akhir-akhir ini juga dikembangkan komoditi kelapa sawit.

Kabupaten Indragiri Hulu, mempunyai basis di sub sektor perkebunan dengan tanaman unggulan karet dan kelapa sawit, serta di sektor industri pengolahan CPO. Sementara Kabupaten Kampar di sub sektor perikanan dan sub sektor perkebunan kelapa sawit.

Kabupaten Pelalawan di samping sektor pertanian (sub sektor perkebunan) dengan komoditi kelapa sawit sebagai unggulan dan basis, juga industri pengolahan dari hasil kehutanan.

Dari kontribusi persektor di atas, maka dapat terpilih 3 (tiga) sektor terbesar untuk masing-masing daerah Kabupaten dan

Kota di Provinsi Riau. Tabel dibawah ini menggambarkan bahwa Provinsi Riau sebagai wilayah yang didominasi wilayah daratan, ternyata yang dominan adalah sektor pertanian, keadaan ini bahwa sebahagian besar daerah didominasi sub sektor perkebunan, sub sektor perikanan, sub sektor kehutanan, dan sub sektor tanaman pangan, namun sektor industri pengolahan baik yang mengolah hasil pertanian (agroindustri) manapun industri non pertanian berpotensi untuk berkembang. Daerah yang spesifik adalah Pekanbaru dan Dumai, yang tidak berbasiskan sektor pertanian, tetapi mempunyai kontribusi terbesar di sektor perdagangan, bangunan dan jasa, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Hal ini sesuai dengan kondisi Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan pemerintah serta pembangunan yang terlihat pesat terutama perdagangan (seperti mall, dan Ruko-ruko), dan jasa-jasa profesional, pendidikan, dan jasa-jasa lainnya. Sementara Kota Dumai sebagai kota persinggahan juga dominan dengan sektor perdagangan, dan tentunya didukung dengan tersedianya sektor pengangkutan sebagai sarana transportasi, baik darat maupun laut. Dilihat unggul karena memiliki pelabuhan samudra karena letak geografis yang sangat strategis.

Gambaran tentang sektor seperti pada Tabel 10 memberikan inspirasi bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Riau yang cukup pesat membawa pengaruh pada perubahan struktur ekonomi di 11 kabupaten dan kota, dimana sebahagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Riau terjadi pergeseran dari sektor pertanian sebagai basis menjadi sektor industri dan jasa serta sektor lainnya. Terlihat juga bahwa hampir semua kabupaten dan kota di provinsi Riau (kecuali Rokan Hulu dan Indragiri Hilir) tidak hanya bertumpu pada satu sektor saja sebagai basis, melainkan ada beberapa sektor yang dapat dijadikan basis di samping adanya potensi sektor non basis yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB kabupaten dan kota tersebut yang dapat dijadikan basis untuk pengembangan komoditi unggulan di masa yang akan datang di daerah tersebut.

Tabel 10 : Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Dan LQ Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Riau Tahun 2005-2009

No.	Kabupaten	Kontribusi Sektor Terhadap PDRB dan LQ								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pekanbaru	1,93 NON BASIS	0,03 NON BASIS	11,61 NON BASIS	1,46 BASIS	17,30 BASIS	29,58 BASIS	14,67 BASIS	5,18 BASIS	18,22 BASIS
2.	Dumai	7,20 NON BASIS	0,43 NON BASIS	Potensi 26,64 NON BASIS	0,66 BASIS	13,63 BASIS	20,89 BASIS	16,47 BASIS	1,66 BASIS	12,46 BASIS
3.	Bengkalis	Potensi 20,20 NON BASIS	Potensi 36,79 NON BASIS	10,96 NON BASIS	0,43 BASIS	2,85 NON BASIS	18,39 BASIS	2,14 NON BASIS	1,27 BASIS	7,16 BASIS
4.	Siak	Potensi 22,03 NON BASIS	Potensi 35,81 NON BASIS	33,68 BASIS	0,06 NON BASIS	0,54 NON BASIS	3,32 NON BASIS	1,09 NON BASIS	0,57 NON BASIS	2,83 NON BASIS
5.	Rokan Hilir	Potensi 39,24 BASIS	31,53 NON BASIS	6,59 NON BASIS	0,20 NON BASIS	0,55 NON BASIS	14,70 BASIS	1,85 NON BASIS	0,99 NON BASIS	4,35 NON BASIS
6.	Rokan Hulu	60,90 BASIS	4,03 NON BASIS	5,56 NON BASIS	0,07 NON BASIS	3,73 NON BASIS	5,23 NON BASIS	2,66 NON BASIS	1,55 NON BASIS	8,60 NON BASIS
7.	Indragiri Hulu	50,52 BASIS	3,44 NON BASIS	19,01 BASIS	0,24 NON BASIS	5,30 NON BASIS	8,23 NON BASIS	3,85 NON BASIS	1,22 NON BASIS	8,19 NON BASIS
8.	Indragiri Hilir	49,56 BASIS	0,62 NON BASIS	POTENSI 16,49 NON BASIS	0,10 NON BASIS	4,10 NON BASIS	14,88 NON BASIS	2,96 NON BASIS	1,62 NON BASIS	9,68 NON BASIS
9.	Kuantan Singingi	59,98 BASIS	4,90 BASIS	8,01 NON BASIS	0,20 NON BASIS	5,88 NON BASIS	7,86 NON BASIS	2,28 NON BASIS	1,19 NON BASIS	9,69 NON BASIS
10.	Kampar	46,68 BASIS	26,57 BASIS	6,07 NON BASIS	0,09 NON BASIS	3,45 NON BASIS	7,76 NON BASIS	2,45 NON BASIS	0,82 NON BASIS	6,13 NON BASIS
11.	Pelalawan	56,53 BASIS	2,46 NON BASIS	27,16 BASIS	0,13 NON BASIS	2,85 NON BASIS	3,20 NON BASIS	2,22 NON BASIS	1,45 NON BASIS	4,01 NON BASIS

Keterangan : 1) Pertanian, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Listrik, Gas, Dan Air Minum, 5) Bangunan, 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran, 7) Pengangkutan dan Komunikasi, 8) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, 9) Jasa-jasa

Kontribusi dinyatakan dalam angka persen sedangkan nilai LQ dinyatakan dalam basis dan non basis.



E.3. Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Riau

Tingkat Perkembangan sektor ekonomi di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Riau dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai masing-masing daerah tersebut. Menurut Sadono Sukirno (2006), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Menurut teori kutub pertumbuhan (Lincoln Arsyad, 1999), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda.

Untuk melihat perkembangan ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel 10 :

Tabel 11 : Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/ Kota ADH Konstan Tahun 2000 Tanpa Migas Provinsi Riau (2005-2008).

No	Kab/Kota	Tahun			
		2005	2006	2007	2008
1	Kuansing	8,81	8,83	8,91	8,26
2	Inhil	7,54	7,41	7,36	7,53
3	Inhil	7,03	7,94	7,82	7,95
4	Pelalawan	7,11	7,66	7,20	7,14
5	Siak	6,88	7,82	7,85	7,61
6	Kampar	7,33	7,71	7,99	7,97
7	Rohul	7,38	7,23	7,11	7,08
8	Bengkalis	7,40	7,69	7,87	7,60
9	Rohil	7,92	8,07	7,95	7,88
10	Pekanbaru	10,05	10,15	9,89	9,05
11	Dumai	7,74	9,34	8,87	8,66
12	Total Kab/ Kota	7,90	8,29	8,22	8,00
13	Provinsi	8,54	8,66	8,25	8,06

Sumber : BPS, BAPPEDA diolah 2009

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada umumnya kabupaten dan kota mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang baik, yaitu masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,1 persen. Pertumbuhan ekonomi yang rata-rata berkembang ini menunjukkan iklim yang baik untuk investasi, industri pengolahan dan aktivitas bisnis lainnya.

F. PERKEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI RIAU

Hadirin yang saya hormati,

Gambaran Tabel 12 berikut ini, menunjukkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Riau, yang merupakan sektor basis di Kabupaten dan Kota tersebut.

Kota Pekanbaru merupakan kota dengan 3(tiga) unggulan, yakni di sektor perdagangan, hotel dan restoran; di sektor jasa-jasa, dan di sektor bangunan. Kota Dumai juga mempunyai 3(tiga) unggulan yakni di sektor perdagangan, hotel dan restoran; di sektor pengangkutan dan komunikasi; di sektor jasa-jasa. Berbeda halnya dengan kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, hanya mempunyai 2(dua) unggulan, yakni di sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan di sektor jasa-jasa.

Kabupaten Siak hanya mempunyai 1(satu) unggulan yakni sektor industri pengolahan (terutama bahan baku kertas, dan industri kayu gergajian). Sedangkan Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Inderagiri Hilir, Inderagiri Hulu, Kuantan Singingi, Kampar, dan Pelalawan mempunyai karakteristik keunggulan yang sama yakni sektor pertanian, peternakan dan perikanan dengan jenis komoditi yang berbeda walupun ada pula yang sama. Di Rokan Hilir dengan sub-sektor perkebunan sawit, dan sub-sektor tanaman pangan. Sementara Rokan Hulu juga perkebunan (sawit dan karet), serta sub sektor peternakan yang sudah surplus dan mensuplai kabupaten dan Kota lainnya di provinsi Riau. Sementara itu, di Kabupaten Inderagiri Hilir juga di sub-sektor perkebunan (kelapa, dan juga sawit yang baru dikembangkan);, Inderagiri Hulu juga sub-sektor perkebunan (karet, dan sawit) serta industri pengolahan dari agroindustri. Sedangkan di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kampar mempunyai kesamaan unggulan di sub-sektor perkebunan (karet dan sawit) dan namun Kampar juga unggul di sub setor perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian. Pada sisi lain, Kabupaten Pelalawan disamping sub-sektor perkebunan (sawit), perikanan dan kehutanan juga mempunyai industri pengolahan terutama industri besar kehutanan (pulp dan kertas).

Tabel 12: Sektor Unggulan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Riau

No.	Kabupaten	Sektor Unggulan								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pekanbaru	1,93 NON BASIS	0,03 NON BASIS	11,61 BASIS	1,46 NON BASIS	Unggulan III 17,30 BASIS	Unggulan I 29,58 BASIS	14,67 BASIS	5,18 BASIS	Unggulan II 18,22 BASIS
2.	Dumai	7,20 NON BASIS	0,43 NON BASIS	Unggulan I 26,64 BASIS	0,66 BASIS	13,63 BASIS	Unggulan II 20,89 BASIS	Unggulan III 16,47 BASIS	1,66 NON BASIS	12,46 BASIS
3.	Bengkalis	Potensi 20,20 NON BASIS	Unggulan 36,79 BASIS	10,96 NON BASIS	0,43 NON BASIS	2,65 NON BASIS	18,39 NON BASIS	2,14 NON BASIS	1,27 NON BASIS	7,16 NON BASIS
4.	Siak	Potensi 22,03 NON BASIS	Unggulan I 35,81 BASIS	Unggulan II 33,68 BASIS	0,06 NON BASIS	0,54 NON BASIS	3,32 NON BASIS	1,09 NON BASIS	0,57 NON BASIS	2,83 NON BASIS
5.	Rokan Hilir	Potensi 39,24 NON BASIS	Unggulan 31,53 BASIS	6,59 NON BASIS	0,20 NON BASIS	0,55 NON BASIS	14,70 NON BASIS	1,85 NON BASIS	0,99 NON BASIS	4,35 NON BASIS
6.	Rokan Hulu	Unggulan I 60,90 BASIS	4,03 NON BASIS	5,56 NON BASIS	0,07 NON BASIS	Unggulan III 3,73 BASIS	5,23 NON BASIS	2,66 NON BASIS	1,55 BASIS	Unggulan II 8,60 BASIS
7.	Indragiri Hulu	Unggulan I 50,52 BASIS	3,44 NON BASIS	Unggulan II 19,01 BASIS	0,24 BASIS	5,30 BASIS	8,23 BASIS	3,85 BASIS	1,22 BASIS	Unggulan III 8,19 BASIS
8.	Indragiri Hilir	Unggulan I 49,56 BASIS	0,62 NON BASIS	Unggulan II 16,49 BASIS	0,10 NON BASIS	4,10 BASIS	Unggulan III 14,88 BASIS	2,96 BASIS	1,62 BASIS	9,68 BASIS
9.	Kuantan Singingi	Unggulan I 59,98 BASIS	4,90 NON BASIS	8,01 NON BASIS	0,20 NON BASIS	5,88 BASIS	Unggulan III 7,86 BASIS	2,28 NON BASIS	1,19 BASIS	Unggulan II 9,69 BASIS
10.	Kampar	Unggulan I 46,68 BASIS	Unggulan II 26,57 BASIS	6,07 NON BASIS	0,09 NON BASIS	3,45 NON BASIS	7,76 NON BASIS	2,45 NON BASIS	0,82 NON BASIS	6,13 NON BASIS
11.	Pelalawan	Unggulan I 56,53 BASIS	2,46 NON BASIS	Unggulan II 27,16 BASIS	0,13 NON BASIS	2,85 NON BASIS	3,20 NON BASIS	2,22 NON BASIS	Unggulan III 1,45 BASIS	4,01 NON BASIS

Keterangan : 1) Pertanian, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Listrik, Gas, Dan Air Minum, 5) Bangunan, 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran, 7) Pengangkutan dan Komunikasi, 8) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, 9) Jasa-jasa



G. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PERUBAHAN STRUKTUR PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU

Hadirin yang saya hormati,

Sektor basis merupakan sektor yang memiliki peranan dalam suatu perekonomian daerah sehingga kemajuan dan kemunduran sektor ini akan mampu membawa pengaruh terhadap perekonomian daerah tersebut. Teori basis ekonomi yang melandasi pemahaman terhadap sektor basis dalam pembangunan daerah dipergunakan untuk mengetahui peranan suatu sektor dalam perekonomian daerah termasuk efek yang ditimbulkannya (Richardson, 2001).

Aktifitas-aktifitas pada sektor basis akan menghasilkan pendapatan basis, sedangkan aktifitas-aktifitas non basis akan menghasilkan pendapatan non basis. Penjumlahan pendapatan basis dan non basis merupakan pendapatan total dari daerah yang bersangkutan (Sukirno, 1986). Implikasi dari aktifitas sektor basis adalah dengan bertambahnya aktifitas sektor basis dalam suatu daerah maka akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah tersebut, sehingga peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan sektor basis tersebut akan mengakibatkan peningkatan permintaan barang dan jasa pada daerah itu.

Richardson (2001), mengemukakan bahwa metode Quosien Lokasi paling lazim digunakan dalam mengidentifikasi aktifitas basis dan non basis. Hal ini disebabkan karena metode ini mempunyai beberapa kebaikan, antara lain adalah: 1) modelnya sederhana, 2) memperlihatkan penjualan barang-barang antara, 3) dapat diterapkan untuk data historis guna melihat kecenderungan, (4) mudah diterapkan, dan (5) relatif murah dalam mengoperasikannya. Analisis Location quotient (LQ) digunakan untuk menentukan sektor unggulan atau basis ekonomi suatu perekonomian wilayah. Sektor unggulan yang berkembang dengan baik tentunya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal

Kriteria pengukuran nilai LQ yang dihasilkan mengacu pada kriteria yang dikemukakan Bendavid-Val (Robinson Tarigan, 2004) sebagai berikut :

- 1) $LQ > 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah lebih besar dari sektor yang sama pada tingkat provinsi.
- 2) $LQ < 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah lebih kecil dari sektor yang sama pada tingkat provinsi.
- 3) $LQ = 1$, berarti tingkat spesialisasi sektor tertentu pada tingkat daerah sama dengan sektor yang sama pada tingkat provinsi

Dalam kaitan dengan hal di atas, bila nilai $LQ > 1$ maka sub sektor atau sektor tersebut merupakan sektor/ sub sektor unggulan di daerah dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Apabila $LQ < 1$ maka sektor/ sub sektor tersebut bukan merupakan sektor/sub sektor unggulan dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perbandingan sektor basis antar daerah kajian dilakukan dengan menggunakan data PDRB persektor berdasarkan harga konstan tahun 2000, dan analisis dilakukan terhadap data *series* 9 (sembilan) tahun, yakni dari tahun 2000-2008.

Melalui kajian ini dapat diketahui bahwa berdasarkan perbandingan LQ antar sektor di masing-masing daerah di Provinsi Riau terdapat perbedaan potensi berdasarkan struktur ekonomi yang ada pada masing-masing daerah tersebut.

Sebagaimana yang dikemukakan pada teori sebelumnya, intinya menjelaskan bahwa adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita dengan perubahan struktur perekonomian suatu daerah (atau negara). Jika dilihat pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita di 11 (sebelas) kabupaten dan kota di Provinsi Riau selama beberapa tahun terakhir mengalami pergeseran, yakni

mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang dapat ditunjukkan pada Tabel 12.

Dari hal di atas dapat dilihat perubahan struktur perekonomian di 11(sebelas) kabupaten/kota di provinsi Riau dari berbasis pertanian yang dominan ke sektor industri manufaktur, dan jasa serta sektor lainnya. Artinya, perubahan struktur perekonomian juga terjadi di kabupaten dan kota di Provinsi Riau, sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita sebagai akibat dari adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini telah mendorong pulai menurunnya penduduk miskin dalam periode waktu tahun 2002-2008 dari 15,39 persen menjadi 10,63 persen.

Jumlah penduduk miskin tahun 2002 sebesar 635.000 orang turun menjadi 566.670 pada tahun 2008. Penurunan penduduk miskin terlihat cukup nyata di daeran pedesaan dibandingkan perkotaan. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Selain mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijaksanaan pembangunan juga sekaligus seyogianya mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Pada periode tahun 2007-2008 misalnya; indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kecenderungan menurun, masing-masing dari 1,63 menjadi 1,25 dan 0,40 menjadi 0,25. Angka-angka ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit sebagai adanya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Riau.

Tabel 13: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Riau Menurut Daerah 2002-2009

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2002	n.a	n.a	635,0	n.a	n.a	15,39
2003	n.a	n.a	660,7	n.a	n.a	14,97
2004	n.a	n.a	658,6	n.a	n.a	14,67
2005	199,9	400,5	600,4	8,26	16,82	12,51
2006	226,3	338,6	564,9	9,37	14,40	11,85
2007	246,4	328,1	574,5	9,53	12,90	11,20
2008	245,1	321,6	566,67	9,12	12,16	10,63
2009 (*)	225,6	301,9	527,49	8,04	10,93	9,48

Sumber : BPS, BAPPEDA diolah 2009

H. PENUTUP

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan karakteristik provinsi Riau, sebahagian besar (88,11%) adalah wilayah darat, sejak lama sebagai penghasil Migas terbesar di Indonesia, namun mempunyai kecepatan yang relatif rendah terhadap perubahan struktur perekonomian daerah ini. Sebahagian besar Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau berbasis sektor Pertanian kecuali Siak, Dumai dan Pekanbaru. Sektor Pertanian yang dominan adalah sub-sektor perkebunan terutama : sawit, kelapa, karet dan perikanan darat serta argo industri.

Laju pertumbuhan perekonomian provinsi Riau mengalami pertumbuhan yang relatif cepat jika dibandingkan dengan perekonomian nasional. Hal ini di cerminkan oleh perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) sebagai akibat dari peningkatan pembentukan modal, perkembangan tenaga kerja dan perubahan teknologi yang terjadi dalam kondisi ketidakseimbangan. Pertumbuhan ekonomi ini juga disertai dengan berbagai upaya diversifikasi, baik melalui upaya pemerintah maupun masyarakat atau merupakan pengaruh dari keadaan internal dan eksternal. Artinya pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya pergeseran pola permintaan dan penawaran yang diikuti oleh perubahan penggunaan faktor produksi dan perkembangan teknologi berbagai sektor. Selama pertumbuhan ekonomi berlangsung, alokasi sumberdaya keberbagai sektor mengalami perubahan yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan pergeseran dalam pola permintaan dan penawaran yang menyebabkan perubahan struktur perekonomian walaupun dengan kecepatan yang perlahan.

Di Provinsi Riau telah terjadi pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur perekonomian yang relatif lambat dibandingkan dengan pertumbuhan dan perubahan struktur perekonomian nasional. Pada tahun awal pengamatan struktur

perekonomian provinsi Riau adalah agraris dengan peran sektor pertanian yang sangat dominan kemudian tahun akhir pengamatan struktur perekonomian provinsi Riau telah berubah menjadi menuju proses industrialisasi dengan menurunnya peranan sektor pertanian dan meningkatnya sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Di proyeksikan struktur perekonomian Provinsi Riau akan memasuki tahap semi industri pada tahun 2014 di mana peran sektor industri manufaktur menjadi lebih besar dari 20 % terhadap PDRB.

Pada sisi lain tergambar pula bahwa perubahan struktur perekonomian ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi melalui perubahan pola permintaan dan pola penawaran. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi sejalan dengan meningkatnya tingkat pendapatan perkapita. Oleh karena terdapatnya perbedaan percepatan pertumbuhan antara sektor pertanian dan industri. Disamping itu, terlihat adanya perubahan akumulasi, alokasi sumberdaya dan distribusi demografi dalam proses pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan struktur perekonomian provinsi Riau. Dibanding dengan pola normal Chenery dan Syrquin (1975) pola dan arah tahapan proses pertumbuhan ekonomi provinsi Riau sedikit berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaannya variabel ekonomi dan sosial seperti perkembangan teknologi, sumber keuangan yang lebih luas dan kebijakan pemerintah yang terarah di samping keadaan tentang waktu yang diukur.

Tingginya laju pertumbuhan sektor industri khususnya industri manufaktur dalam proses industrialisasi di Provinsi Riau menyebabkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Permintaan barang konsumsi pangan secara relatif menurun, sedangkan permintaan barang industri meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita (hukum Engel). Diduga faktor-faktor yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan sektor industri di Provinsi di Riau adalah besarnya PMA dan PMDN yang didominasi sektor industri, perkembangan teknologi industri yang relatif cepat perkembangan sektor

perhubungan dan pengangkutan yang relatif baik, kenaikan nilai tukar barang industri yang relatif cepat, kebijaksanaan substitusi impor dan tingginya tingkat keuntungan pada sektor industri.

Selain itu digambarkan pula bahwa dukungan sumberdaya alam yang besar akan memperlambat perubahan struktur perekonomian, khususnya pada tahap permulaan dari pembangunan ekonomi di Provinsi Riau tekanan pada perdagangan bebas dan keunggulan komparatif akan menyebabkan daerah yang memiliki dukungan kekayaan sumberdaya alam penting, menunda atau mempercepat perubahan struktural menurut pola normal Chenery dan Syrquin (1975).

Akhirnya saya sampaikan terima kasih atas perhatian hadirin yang kami hormati.

Wabillaahittaufig wal hidayah

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

I. KEPUSTAKAAN

- BPS, 2009. Riau Dalam Angka 2008. Kerjasama Bappeda Provinsi Riau dan BPS, Pekanbaru
- BPS, 2008, Pendapatan Regional Riau Menurut Lapangan Usaha 2003-2007, Kerjasama Bappeda Provinsi riau dan BPS Provinsi riau, Pekanbaru.
- , 2005. Statistik Perdagangan Luar Negeri Provinsi Riau Menurut Kabupaten/ Kota tahun 2003. BPS Provinsi Riau Pekanbaru.
- , 2005. Statistik Indonesia 2005/2006, BPS, Jakarta.
- Badan Promosi dan Investasi, 2005. Expose Proyek Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, BPI Provinsi Riau Peknbaru.
- Bank Indoensia, 2006. Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Riau, Bank Indonesia Pekanbaru.
- , 2006. Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Propinsi Riau Tahun 2005, Bank Indonesia KBI Pekanbaru.
- , 2009, Kajian Ekonomi Regional Provinsi Riau, Triwulan 1, Seksi Statistik dan Kajian Ekonomi Moneter, Kantor BI Pekanbaru.
- Chenery, Holis & Moises Syrquin. 1975. *Patterns of Development, 1950-1970*. Oxford University Press.
- , 1989. *Structural Change and Development Policy*. Oxford University Press. International bank. Washington D.C.
- Clark, Collin. 1984. *Development Economics : The Early Year*. Dalam Gerald M Meier and Dudley Seers *Pioneers in Development*. The World Bank. Washington D.C.
- Hoover Edgar M. 1983. *The Location of economic Activity*, McGraw-Hill Book Company, New York.
- Glasson, John. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Isyandi, 1996, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Perubahan Struktur Perekonomian Jawa Barat Dalam*

- Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (1969-1993), Disertasi, Universitas Padjadjaran,, Bandung
- , 2005. Menggesa dan Gejolak Perekonomian Indonesia : Memasuki era Otonomi Daerah dan Globalisasi, Unri Press Pekanbaru
- , 2005. Dampak Makro Ekonomi Indonesia terhadap Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Riil di Propinsi Riau, Makalah ISEI, Jakarta.
- , 2005. Perspektif Daerah Riau : Potensi, Peluang dan Tantangan dalam Memasuki Pasar Ekspor Negara Jepang, RRT dan Taiwan, Makalah, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional dan Disperindag Provinsi Riau, Pekanbaru.
- , 2006, Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit di Provinsi Riau, Proceeding Paper, Bank Indonesia KBI Pekanbaru
- Isyandi dan Kawan-kawan, 2007, Mapping Potensi Ekonomi Propinsi Riau dan Kepulauan Riau, FE-Unri dan Bank Riau, Pekanbaru.
- Iwan Jaya Aziz, Ilmu Ekonomi Regional dan beberapa Aplikasinya di Indonesia, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kuznets, Simon. 1969. Economic Growth and Structure : Selected Essay. Indian Edition. Oxford & IBH Publishing Co. New Delhi.
- , 1966. Modern Economic Growth. Yale University Press. New York
- Lewis, W.A. 1954. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. The Manchester School. Vol-XXII.
- , 1957. The Theory of Economic Growth. Allen & Unwin. London
- Kompas. 2004. Enam Fokus Masalah Lintas Sektoral Harus Segera diatasi : Rekomendasi Kadin Indonesia ke Presiden ; Bisnis dan Investasi, Kamis 28 Oktober 2004.
- Jhingan, ML. 1990. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Rajawali Pers, Jakarta

- Joyo Winoto, 2005. Peranan Pembangunan Infrastruktur Dalam Menggerakkan Sektor Riil, ISEI Jakarta.
- Muchtarudin Siregar, 1981. Beberapa Masalah Ekonomi dan Management Pengangkutan, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Nurkse, R. 1953. Problema of Capital Formation in Under Developed Countries. Basil Blackwel. Oxford.
- Lincoln Arsyad, 1999. Ekonomi Daerah : Pengantar Perencanaan dan Pembangunan, BPFE Jakarta
- Richardson, H. W. 2001. Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional (Terjemahan Paul Sihotang) Edisi Revisi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indoensia, Jakarta.
- Robinson Tarigan. 2004, Ekonomi Regional : Teori dan Aplikasi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Rostow, W. W. 1965. Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi. (terjemahan Paul Sihotang). Bratara. Jakarta.
- Riayadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Samuelson, Paul. A and Nordhaus William D. 1995. Economis. 15-th Edition International Edition. Mc-Graw-Hill Book Company, New York.
- Sadono Sukirno. 2006, ekonomi Pembangunan : Proses Masalah dan Dasar Kebijakan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2005, Makro Ekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 1985, Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Siebert, Horst. 1969. Regional Economic Growth : Teory and Policy. International Textbook Company. Pennsylvania.
- Suryana. 2000, Ekonomi Pembangunan : Problematika dan Pendekatan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Todaro, Michael. P. 1997. *Economic Development*. Sixth Edition.
Longman Publisher, London

Yotopoulos, Pan. A and Nugent, B. Jeffrey. 1976. *Economic of
Development. Empirical Investigations*. Harper
International Edition. Harper row, Publishers. New york.



J. UCAPAN TERIMA KASIH

Sebelum saya mengakhiri pidato pengukuhan ini, pertama dan utama sekali saya memanjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan kemampuan berfikir yang cukup dalam menyerap ilmu pengetahuan sehingga saya dapat menggapai jenjang jabatan akademik tertinggi berupa Guru Besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Riau..

Selanjutnya, ucapan terima kasih yang tulus saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, ibunda Hj. Armis yang telah mengandung , melahirkan dan membesarkan saya, dan ayahanda Syofyan Rukman (Alm; yang telah berpulang ke Rahmatullah pada tahun 1978 di kala saya sedang menuntut ilmu di Fakultas Teknik Sipil di Jakarta; Semoga arwah beliau mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT). Dari mereka berdua saya belajar membaca untuk pertama kalinya, mereka berdua telah mendidik saya dalam lingkungan disiplin, teratur dan bertata-nilai. Mereka menanamkan kepada saya semangat pantang menyerah, memotivasi dan menginspirasi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Terima kasih untuk segala pengorbanan, doa, kasih sayang dan penanaman disiplin yang diberikan kepada saya.

Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada isteri, Dra. Hj. Miranita, MM; yang senantiasa memberikan motivasi dan inspirasi serta sebagai teman berdiskusi dikala gelombang kehidupan lagi surut atau mengingatkan ketika gelombang sedang pasang. Juga kepada ananda Rahmat Rizal, Dwita Razkia dan Ayu Husna, yang selalu waktunya terabaikan oleh karena perhatian yang terbagi yang seharusnya milik mereka terpaksa berbagi dengan kesibukan dan target yang harus dikejar setiap saat.

Pada saat yang bersejarah bagi diri saya ini, saya sampaikan terima kasih kepada guru-guru saya sejak Sekolah Dasar Negeri Teladan I di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, SMP Negeri II di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan SMA

Negeri XXV di Jakarta, juga dosen-dosen selama saya menyenjam Pendidikan Tinggi, baik di Universitas Riau maupun di Universitas Padjadjaran Bandung yang tidak dapat saya sebutkan seorang demi seorang, karena berkat jasa-jasa mereka saya dapat menyelesaikan studi sehingga dapat dikukuhkan hari ini sebagai Guru Besar. Saya mendoakan semoga Allah SWT membalas jasa-jasa mereka.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak Drs. Said Syahbuddin (Alm) dan Drs. Abd. Aziz Ibrahim (Alm) guru saya di Fakultas Ekonomi Universitas Riau, yang telah banyak memberikan pencerahan dan arahan terhadap minat saya pada bidang ilmu ekonomi pembangunan; juga kepada bapak Prof. Bosman Saleh, MBA selaku Rektor Universitas Riau, yang memberi izin kepada saya untuk melanjutkan program Magister (S2) dan program Doktor (S3) sekaligus membakar semangat saya.

Terima kasih kepada pembimbing disertasi saya, Prof. Dr. Yuyun Wirasmita, MSc; Prof. Dr. T. Dzulkarnain Amin, SE, MA.; Prof. Dr. Usman Hardi, SE, MS; yang telah menunjukkan kepada saya bagaimana seharusnya melakukan penelitian bidang ekonomi pembangunan. Juga kepada Prof. Dr. Rasjid Sukarya, Prof. Dr. Tuhpawana P.Sendjaja; Prof. Dr. Burhan Arief, Prof. Dr. Husen Djajasukanta, Prof. Dr. Armida S Alisyahbana, yang telah banyak memberikan dorongan, semangat untuk keberhasilan saya.

Kepada sahabatku, Prof. Dr. Sucherly, SE, MS; saya mengucapkan terima kasih atas persahabatan kita sejak mengawali program S2 dan S3 sebagai sahabat yang memberi dan menempa saya dalam dunia penelitian.

Terima kasih yang tulus juga disampaikan kepada Prof. Dr. Adnan Kasry, dan Prof. Dr. Aslim Rasyad atas nasehat, mengingatkan dan dorongan kepada saya dalam kelalaian saya melengkapi dokumen pengusulan Guru Besar. Juga Prof. Dr. Almasdi Syahza, Prof. Dr. Yohannas, Drs. Kennedy, MM, Ak; Drs. Zainal Abidin Zain, MM, AK yang banyak memberikan bantuan moril dan materil untuk hal tersebut.



Ucapan terima kasih saya dan keluarga disampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional, melalui bapak Rektor Universitas Riau yang telah menetapkan dan mengangkat saya sebagai Guru Besar tetap di Universitas Riau. Juga dengan penuh kerendahan hati terima kasih saya sampaikan kepada bapak Rektor Universitas Riau, Prof. Dr. Ashaluddin Jalil, MS dan segenap pimpinan atas segala perhatian, bantuan, kesempatan, dan kepercayaan yang diberikan sehingga saya ditetapkan sebagai Guru Besar Universitas Riau.

Kepada Dekan, dan segenap pimpinan, serta Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Riau, saya menyampaikan rasa terima kasih, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan karir sebagai dosen di jurusan Ilmu Ekonomi, pada hari ini saya dikukuhkan sebagai Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan. Semoga apa yang saya peroleh ini akan meningkatkan lagi pengabdian saya dalam menyampaikan dan mengembangkan ilmu kepada segenap civitas akademika Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Kepada tim Teaching saya, Dr. Laode Kalimin, Drs. Wahyu Hamidi, MS, Dra. Sri Endang Kornita, M.Si, Drs. Syafril Basri, M.Si, Drs. Dahlan T, MS, serta tim diskusi saya, Dr. Zulkarnain, MM, Dr. Zulfadil, SE, MBA, Drs. Machasin M.Si, Dra. Hj. Sri Indarti, M.Si, Dra. Yulia Efni, ME, Dr. Djanimar Jamin, MS, saya menyampaikan terima kasih atas semua inspirasi dan bantuan yang diberikan.

Kepada semua mahasiswa saya, terima kasih, karena andalah saya berada hari ini.

Kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi terlaksananya acara pengukuhan ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Kepada mereka yang namanya tidak sempat disebutkan satu per satu dan telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, dengan rendah hati dan tulus ikhlas saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada saya.

Saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih yang tulus bagi semua pihak atas bantuan dan kebaikan. Terima kasih atas kesabaran para hadirin untuk mengikuti acara pengukuhan ini.

Sebelum saya mengakhiri pidato pengukuhan ini, rasanya kurang lengkap bila saya tidak menyampaikan pantun sebagai salah satu adat dan budaya di tanah Melayu :

Biji selasih lezat dimakan;
Dicampur santan ditambah durian;
Terima kasih saya ucapkan;
Khilaf dan salah mohon dimaafkan

Demikian pidato pengukuhan ini saya sampaikan, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNYA kepada kita semua.

Wabillaahittaufig wal hidayah

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

K. RIWAYAT HIDUP

I. KETERANGAN DIRI :

1. Nama : PROF. DR. H. B. ISYANDI, SE, M.Sc
NIP : 19570915 198603 1 006
2. Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Pinang, 15 September 1957
3. Alamat Rumah : Jalan Hang Tuah – Kamp. Kelapa No.35
Rt-01 RW-06 Sukamulia Pekanbaru-28133
e-mail : hb_isyandi@yahoo.com
Telp (0761) 40094 ; 885881,
HP-0811752984
4. Pangkat/ Gol : Guru Besar, Pembina Tingkat-I / IV-b
5. Jabatan : Pembantu Dekan-I Fakultas Ekonomi UNRI
6. Agama : Islam
7. Keluarga :
 - 7.1. Nama Ayah : Syofyan Rukman (Alm)
 - 7.2 Nama Ibu : Hj. Armis
 - 7.3 Nama Istri : Dra. Hj. Miranita, MM
 - 7.4 Nama Anak :
 - a) Rahmat Rizal
 - b) Dwita Razkia
 - c) Ayu Husna

II. BERBAGAI KEGIATAN DALAM ORGANISASI :

- a) Sekretaris Badan Pengawas PDAM Tirta Siak Pekanbaru
- b) Ketua Bidang Penelitian & Pembangunan ISEI cabang Pekanbaru
- c) Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga ICMI Riau
- d) Anggota Dewan Riset Propinsi Riau
- e) Sekretaris TIM Advisory Pemerintah Kabupaten Siak
- f) Anggota Dewan Produktivitas Provinsi Riau
- g) Kepala Bidang Pengembangan SDM FOREK Provinsi Riau
- h) Ketua Yayasan Haji Muhammad Yusuf -Pekanabru

III. RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. Sekolah Dasar Negeri I di Tanjung Pinang, tahun 1971
2. Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri II di Tanjung Pinang, tahun 1973
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Negeri XXV di Jakarta, tahun 1976
4. Fakultas Teknik (Jurusan Sipil) UKI - Jakarta (1977-1979)
5. Ijazah S1 Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi UNRI, tahun 1984
6. Ijazah S2 Fakultas Pascasarjana UNPAD Bandung, tahun 1990, Bidang Kajian Utama Ilmu Ekonomi Pertanian
7. Ijazah S3 dari Fakultas Pascasarjana UNPAD Bandung, tahun 1996, Bidang Ilmu Ekonomi, spesialis *Ekonomi Pembangunan dan Regional*.

IV. KURSUS DAN PELATIHAN

a. Kursus yang Telah Diikuti :

1. Sertifikat Kursus Bahasa Inggris dari Fakultas Sastra UNPAD, tahun 1988 dan Oxford Course Jakarta, tahun 1978
2. Sertifikat Penataran P4 Tipe Pola Penatar 120 jam, tahun 1984 dari BP7 Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Sertifikat Latihan Pra Jabatan Tingkat III Depdikbud, tahun 1987 dari Universitas Riau di Pekanbaru
4. Sertifikat Kursus Komputer Aplikasi (WS. Lotus 123 dan Dbase-III plus) dari LIKMI Bandung, tahun 1990
5. Sertifikat Workshop Proposal Penelitian, tahun 1994 dari ITB Bandung
6. Sertifikat : Workshop on Laboratory Development Management Department Faculty of Economics, HEDS-JICA, 16-21 December 1996, Andalas University, Padang
7. Sertifikat : Workshop On Fiscal Desentralization-I, March-2000, IRIS-USAID, Jakarta
8. Sertifikat : Workshop On Fiscal Desentralization-II, June 2000, IRIS-USAID, Jakarta
9. Sertifikat : Workshop On Structural Equation Modeling, Lisrel &

- Amos – Angkatan II, 11-13 Maret 2002, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Tahun 2002, Malang – Jawa Timur.
10. Sertifikat : Workshop on Policies for Regional Economics Development in Desentralizing Era, FE-Univ. HKBP Nommensen-LPEM FE-UI – IRIS, 14-16 May 2002, Medan.
 11. Sertifikat : Workshop On Teaching Method, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Unri, 17-18 Maret 2006, Universitas Riau Pekanbaru.
 12. Sertifikat : Lokakarya pada Technical Assistance Mata Kuliah Kewirausahaan : Prof. Dr. Sugeng Wahyudi, diselenggarakan di laboratorium Akuntansi FE-UNRI, 29 Juli 2006, Universitas Riau, Pekanbaru.
 13. Sertifikat : Pendidikan Pembekalan Nasional pada : Sistem Penataan Ruang Nasional dan Pengelolaan Tata Ruang Pesisir dan Laut Pasca Tsunami ; Sebuah Tinjauan Mendorong Keterpaduan Wilayah Menjadi Matra Spasial Rencana Pembangunan Nasional, 13-19 September 2006, Lembaga Pengkajian Kepemimpinan dan Pengembangan Daya Manusia, Bali, Indonesia.
 14. Sertifikat Pendidikan : Strategi Inovasi kebijakan Dalam Meningkatkan Investasi Di Daerah, 30 Nopember 2006, Lembaga Administrasi Negara Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I, Bandung.
 15. Sertifikat : Pendidikan Program Edukasi Pasar Modal 2007 Tingkat Basic, PT Bursa Efek Jakarta.
 16. Sertifikat : Kursus *Manajemen Sumber Daya Manusia/Analisis Perilaku Karyawan*, dosen pembimbing : Dr. T. Hani Handoko, MBA, semester II 2006/2007 selama 1 bulan (14 Februari 2007-14 Maret 2007), Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
 17. Sertifikat : Kursus Pelatihan Pembelajaran Inovasi Dalam Mata Kuliah Ekonomi Bagi Dosen PTN/PTS Se-Jawa, Bali dan Sumatera, 23-29 Juli 2006 (48 Jam), Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Bogor.
 18. Sertifikat : Pelatihan Monitoring dan Evaluasi (Monev), 12 Agustus 2006, Universitas Riau, Pekanbaru.
 19. Sertifikat : Sosialisasi Undang-undang No. 19 tahun 2003 Tentang

- BUMN dan Peraturan Pelaksanaannya, 23 Agustus 2006, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, Pekanbaru.
20. Sebagai Peserta pada Lokakarya : Statistics For Management, 12-13 September 2006, TPSDP Universitas Riau, Universitas Riau, Pekanbaru.
 21. Sertifikat : Workshop Inovasi dan Pengembangan Kurikulum, 1,2 dan 4 September 2006, Fakultas Ekonomi Universitas Riau Jurusan Ilmu Ekonomi, Pekanbaru.
 22. Sertifikat : Lokakarya Penyusunan SAP dan GBPP Tahun 2006, 09 Nopember 2006, Program Hibah Kompetisi A2 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru.
 23. Sertifikat : The Workshop Quality Assurance, 5-6 Desember 2006, TPSDP Universitas Riau, Pekanbaru.
 24. Sertifikat : Workshop Program Development ISS-MIS TPSDP UNRI : Efektifitas Kinerja Kebijakan dan Organisasi MIS (Management Information System, 28 Februari- 1 Maret 2007, UPT Komputer Universitas Riau, Universitas Riau, Pekanbaru.
 25. Sertifikat : Lokakarya, Metodologi Penelitian Berbasis Kompetitif, TPSDP Universitas Riau, 13-14 Maret 2007. Universitas Riau Pekanbaru.
 26. Sertifikat : Workshop : Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, 25 – 26 Juli 2007, Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional, Pekanbaru.
 27. Sertifikat : Workshop Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, 25 – 26 Juli 2007, Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional, Pekanbaru.
 28. Sertifikat : Kursus dan Pelatihan ESQ Leadership Training, 17-19 Agustus 2007, ESQ Leadership Center : Ary Ginanjar Agustian, Four Seasins Hotel, Jakarta.
 29. Sertifikat : Pelatihan Teknologi Informasi, 24 Nopember 2007, UPT Puskom Universitas Riau, Pekanbaru.
 30. Sertifikat : Pelatihan Analisa Kuantitatif dan Statistik, 22-24 November 2007, Program Hibah Kompetisi (PHK-A1) Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Riau, Pekanbaru.
 31. Sertifikat : Pelatihan Metode Penelitian, 13-15 Desember 2007, Program Hibah Kompetisi A-1 Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Riau, Pekanbaru.

32. Sertifikat : Pelatihan Statistik, 01 Desember 2007, Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru.
33. Workshop : Local Economic Resources Development, Mei-Juni 2009, International Japan University (IJU), Nigatha, Jepang.

b. Sebagai Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan

1. Sebagai Instruktur pada Pelatihan Manajemen Usaha Kecil (MUK) bagi Pengusaha Kecil ; Nopember 1996, pusat Pembinaan Koperasi dan Pengusaha Kecil (P3KPK) FE-UNRI Pekanbaru.
2. Sebagai Instrutur pada Pelatihan Managemen UKM, 10-16 Nopember 1996, Oleh Kanwil Koperasi Pekanbaru.
3. Sebagai Instruktur, Pelatihan Strategi Pemasaran UKM Propinsi Riau, 9-14 Agustus 1998, P3KPK-Universitas Riau, Pekanbaru.
4. Sebagai Instruktur, TKMP Propinsi Riau, 6-11 Januari 1999, Kanwil Departemen Transmigrasi Propinsi Riau, Pekanbaru.
5. Sebagai Instruktur : Pelatihan Inovasi Metode Pembelajaran, 20-22 Maret 2006, Fakultas Ekonomi Universitas Riau Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Riau Pekanbaru.
6. Sebagai Instruktur : Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Usaha Kecil & Menengah Mitra Binaan PT (persero) Angkasa Pura II Bandara SSK II, 26-27 Juni 2006, PT(Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru.
7. Sebagai Instruktur :Pelatihan Manajemen Pengembangan Usaha Bagi Mitra Binaan PKBL Jasa Raharja, 11-13 September 2006, Jasa Raharja dan P3KPK Universitas Riau, Pekanbaru.
8. Sebagai Instruktur pada : Pelatihan Pengembangan Kewirausahaan Bagi Mitra Binaan PKBL PT. (persero) Jamsostek Cabang Riau, 28-30 Agustus 2007, PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) cabang Riau, Pekanbaru.
9. Sebagai Instruktur pada Pelatihan Akuntansi Praktis Mitra Binaan PT. (persero) Pelabuhan Indonesia I cabang Dumai, 30 Oktober-01 November 2007, PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I cabang Dumai.

V. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Pengalaman Mengajar

1985-sekarang	:	Dosen Tetap pada FE-UNRI di Pekanbaru
1985-1987	:	Dosen Luar Biasa pada FE-UNILAK Riau
1991-1996	:	Dosen Luar Biasa pada FE-UNPAS Bandung
1990-1996	:	Dosen Luar Biasa pada STIE Pasundan Bandung
1991-1995	:	Dosen Luar Biasa pada AKPI Bandung
1995- 1996	:	Dosen Luar Biasa pada STIE YPKP Bandung
1997-1998	:	Dosen Luar Biasa FE-UIR di Pekanbaru
1997-1998	:	Dosen Luar Biasa FE-Univ.Lancang Kuning
1996-sekarang	:	Dosen Tetap pada Magister Manajemen -UNRI
1997-2006	:	Dosen Luar Biasa Magister Manajemen UHAMKA
2000-2001	:	Dosen Luar Biasa Magister Manajemen Muhammadiyah Jakarta,
2000-2007	:	Dosen Luar Biasa STIE Sri Gemilang Tembilahan
2000-sekarang	:	Dosen Luar Biasa STIE Bangkinang
2001-2007	:	Dosen Luar Biasa Magister Teknik Studi Pembangunan ITB-UNRI
2001-sekarang	:	Dosen Luar Biasa Magister Manajemen Pendidikan Univ. Negeri Jakarta-Univ.Riau
2002-2005	:	Dosen Luar Biasa Program MM-UNSRI Palembang
2002-2005	:	Dosen Luar Biasa Program Pascasarjana UNAND.
2001-sekarang	:	Instruktur pada Badan Administrasi dan Pendidikan Latihan Pegawai Pemprov. Riau, Pekanbaru
2002-2005	:	Instruktur pada Pelatihan Metodologi Penelitian Dosen Universitas Riau, Lemlit-UNRI, 5-10 Agustus 2002, Pekanbaru
2008- sekarang	:	Dosen Luar Biasa pada Universitas Islam Inderagiri, Tembilahan

2008 – sekarang : Dosen Luar Biasa pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN Jatinangor, Kampus Pekanbaru

2. Pengalaman dalam Jabatan Struktural dan Administrasi

- 1978-1984, Staf administrasi siaran pada RRI stasiun Pekanbaru
- 1985-1987, Pelaksanaan Harian Pembantu Dekan-I / Kepala Tata Usaha Fakultas Ekonomi Lancang Kuning Pekanbaru.
- 1996-2002, Sekretaris Eksekutif pada Program Magister Manajemen UNPAD-UNRI di Pekanbaru,
- 2001-sekarang, Pembantu Dekan-I Fakultas Ekonomi Universitas Riau
- 2002 (tigabulan) Pjs. DEKAN Fakultas Ekonomi Universitas Riau

3. Pengalaman Penelitian :

- a. Staf Peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi dan Sosial FE-UNRI, 1986
- b. Supervisor pada LP3E Unpad dan Lembaga Manajemen Unpad, tahun 1988 – 1990
- c. Anggota Tim Peneliti : Pola Pertumbuhan dan Perkembangan Kota Kecil sebagai Dampak Pembangunan Nasional di Kampar, tahun 1991
- d. Anggota Tim Peneliti : Pemukiman Kembali Orang Bonai di Kecamatan Kunto Darussalam Dalam Kerangka Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar, Riau tahun 1993, kerjasama PEMDA Tingkat II Kampar dan Universitas Padjadjaran Bandung
- e. Ketua Peneliti : Penyusunan Konsep Perintisan Pengembangan Usaha Kecil Daerah Riau ; Pusat Konsultasi Pembinaan Pengusaha Kecil Fakultas Ekonomi UNRI Pekanbaru, tahun 1996.
- f. Ketua Peneliti, Studi Pengembangan Industri Kecil Kerajinan Cenderamata Daerah Riau, Dinas Perindustrian Propinsi Riau dan Pusat Kajian Dinamika Pembangunan Universitas Riau tahun Anggaran 1997/1998.

- g. Ketua Peneliti, Identifikasi pengangguran di Daerah Tingkat II Propinsi Riau, Kanwil Departemen Tenaga Kerja Propinsi Riau dan Badan Pengkajian Ekonomi dan Pembinaan Dunia Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Tahun 1998.
- h. Ketua Peneliti, Pendapatan Regional Pekanbaru 1995-1997, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kotamadya Pekanbaru dan Pusat Kajian Dinamika Pembangunan Universitas Riau, tahun 1999.
- i. Ketua Peneliti, Pola Konsumsi Rumah Tangga Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru 1998, Badan Perencanaan Daerah Tingkat II Kotamadya Pekanbaru dan Pusat kajian Dinamika Pembangunan Universitas Riau, tahun 1999.
- j. Ketua Peneliti, Perhitungan Produk Domestik Regional Brutto dan Pendapatan dan Pengeluaran Konsumsi Penduduk Kotamadya Pekanbaru, Bappeda Kotamadya Tingkat II Pekanbaru dan Pusat kajian Dinamika Pembangunan Universitas Riau, tahun 2000.
- k. Ketua Peneliti, Penyusunan Sistem Tata Kerja Perencanaan Pembangunan Koperasi Dalam rangka Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pusat Kajian Dinamika Pembangunan Universitas Riau, tahun 2000.
- l. Ketua Peneliti, Survey Angkatan Kerja Daerah Kota Pekanbaru tahun 2000, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Pekanbaru dan Pusat Kajian Dinamika Pembangunan Universitas Riau, tahun 2000.
- m. Ketua Peneliti, Pendataan Potensi Industri dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hulu dan Laboratorium ekonomi Regional Universitas Riau, tahun 2000.
- n. Anggota Peneliti, Perencanaan Tenaga Kerja Otonomi Daerah Propinsi Riau, Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja RI Propinsi Riau, Pekanbaru, Tahun 2000.
- o. Wk. Ketua Tim Peneliti, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Riau, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Riau, Tahun 2002.
- p. Koordinator Tim Peneliti, Kebutuhan Masyarakat Terhadap Denominasi Uang Kartal, Kerjasama Fakultas Ekonomi dengan Bank Indonesia, Tahun 2002.

- q. Wk.Ketua Tim Penelitian, Studi Profil Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun, Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau, Tahun 2002.
 - r. Wk. Ketua Tim Peneliti, Studi Identifikasi Potensi Pendapatan Asli Daerah dan Perhitungan Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan Kabupaten Karimun, Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau, tahun 2002
 - s. Sebagai Ketua Tim Kajian Sosial Ekonomi Penyelenggaraan PON XVIII Tahun 2012 di Propinsi Riau, pada Pemerintah Propinsi riau, Tahun 2005.
 - t. Sebagai Ketua Tim Teaching Grant : Manajemen Sumber Daya Manusia, pada Technological And Profesional Skills Development Sector Project (TPSDP) Universitas Riau, Tahun 2006.
 - u. Sebagai Ketua Tim Peneliti : Mapping Potensi Ekonomi Propinsi Riau dan Kepulauan Riau, pada Bank Riau, Tahun 2006.
 - v. Sebagai Anggota Tim Peneliti Teaching Grant : Penerapan Metode Pembelajaran Pengantar Ekonomi Mikro Dengan Class Action, pada Technological And Profesional Skills Development Sector Project (TPSDP) Universitas Riau, Tahun 2006.
 - w. Sebagai Tenaga Ahli dan Peneliti pada Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Parkir Jalan Umum, Pelayanan Pelabuhan, Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Bengkalis, Tahun 2007, Lembaga Penelitian Universitas Riau
- 4. Tim Dewan Editor dan Dewan Juri Pada Kegiatan Ilmiah.**
- a. Sebagai Penyuting Ahli Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Tahun 2006- sekarang, Fakultas Ekonomi Universitas Riau
 - b. Sebagai Anggota Editor Jurnal SOROT (Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi), Tahun 2008, Lembaga Penelitian Universitas Riau.

VI. KEGIATAN SEMINAR DAN PERTEMUAN ILMIAH

- 1. Sebagai pembicara pada pertemuan Ilmiah Tingkat Dosen Fakultas Ekonomi UNPAS, kegiatan Investasi, Ekonomi, dan Pembangunan yang didukung oleh Pengembangan Manajeernn Bank, pada tanggal 16 Maret 1993 di Bandung

2. Sebagai Pembicara pada forum Dialog Ekonomi Keuangan dan Perbankan, di AKPI BANDUNG, judul : Dampak Peredaran Pecahan Rp.50.000,- terhadap Ekonomi dan Pembangunan tanggal 20 April 1993 di Bandung
3. Sebagai pembicara pada Pekan Orientasi Pembangunan Bappeda Tingkat I Riau, Desember 1996 di Pekanbaru
4. Sebagai Peserta pada Lokakarya pengembangan Laboratorium jurusan ; kerjasama FE-UNAND PADANG dengan HEDS Project, 16-21 Desember 1996 di Padang.
5. Sebagai Panelis, Menyimak Perekonomian Riau, 21 Desember 1996, BPPI-Kadinda Propinsi Riau, Pekanbaru..
6. Ketua Pelaksana, Seminar Sehari Orientasi Pengembangan Ilmu, 10 May 1997, Fakultas ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru.
7. Sebagai Pemakalah, Seminar Pembangunan Propinsi Riau, 28-29 Juli 1997, DPD-MPI Propinsi Riau, Pekanbaru.
8. Sebagai Pemakalah, Lokakarya Membangun Universitas Riset, 9 Agustus 1997, Universitas Riau, Pekanbaru.
9. Sebagai Panelis, Diskusi Panel : Prospek Perekonomian Propinsi Riau 1998, 27 Desember 1997, BPPI-Kadin Propinsi Riau, Pekanbaru.
10. Sebagai Ketua Pelaksana, Diskusi Ilmiah, 31 Juli 1998, Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru.
11. Sebagai Pembicara, Seminar Perkembangan Ekonomi Indonesia Era Reformasi, 5 Agustus 1998, DPD-PPABRI, Pekanbaru.
12. Sebagai Pembicara, Perkembangan ekonomi Indonesia Era Reformasi dan Pengaruhnya bagi Dunia Usaha, 5 Agustus 1998, Fisipol Unri, Pekanbaru.
13. Sebagai Moderator, Seminar Sehari FE-UNILAK, 31 Oktober 1998, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru.
14. Sebagai Panelis, Diskusi Kilas Balik Perekonomian Propinsi Riau, 19 Desember 1998, Kadinda Propinsi Riau, Pekanbaru.
15. Sebagai Pemakalah, Semiloka PPSDM Propinsi Riau, 5-19 Maret 1999, Bappeda Propinsi Riau, Batam.
16. Sebagai Pemakalah, Seminar Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, 15 May 1999, KOPSI Propinsi Riau, Pekanbaru.
17. Sebagai Pembicara, Lokakarya Sosialisasi Peraturan Pemerintah No.64 tahun 1999, 4 September 1999, IAI Propinsi Riau, Batam.



18. Sebagai Narasumber, Diskusi Ekonomi Himpunan Mahasiswa IAIN, 25 April 2000, IAIN Sulthan Syarif Qosim, Pekanbaru.
19. Sebagai Pembicara, Pelatihan Bidang Kepelabuhanan PT. Pelabuhan I Medan, 8-10 May 2000, PT. Pelabuhan Indonesia I Medan, Pekanbaru.
20. Perumus dan Moderator, Dialog Ekonomi Kerakyatan : Strategi dan Implementasi Ekonomi Kerakyatan Riau, 13 September 2000, Yayasan Peduli Negeri, Pekanbaru.
21. Sebagai Peserta, Lokakarya Kebijakan Fiskal dalam Otonomi Daerah , 13-14 April 2001, ISEI Jakarta, Batam.
22. Sebagai Pemakalah, Lokakarya Peran Alumni Fakultas Ekonomi, 16 Juni 2001, Universitas Sriwidjaya, Palembang.
23. Sebagai Peserta, Semiloka Muatan Lokal Universitas Riau tahun 2001, 19-20 September 2001, Universitas Riau, Pekanbaru.
24. Sebagai Peserta, Seminar Customer Satisfactions Revolution : New Rules For Succesfull CS Strategy, 1 May 2002, AMA INDONESIA – BPC Pekanbaru.
25. Sebagai Peserta, Seminar Entrpreneur : Rhenald Kasali, 7 May 2002, Solusi Jakarta, Pekanbaru.
26. Sebagai Ketua Pelaksana, Seminar Desentralisasi Fiskal dan Lokakarya Kode Etik Dosen, 13-17 Agustus 2003, Pekanbaru (*).
27. Sebagai peserta, Seminar Nasional : Kongres Ke XVI Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Meletakkan Kembali Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi Yang Kokoh; 18-20 Juni 2006, Manado, Sulawesi Utara.
28. Sebagai peserta Seminar dan Lokakarya : *Best Practice Inovasi Pembelajaran Di Universitas Riau Melalui Pengintegrasian Hasil-hasil Riset*, 25 April 2006, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Hotel Mona Plaza Pekanbaru.
29. Sebagai Pembicara : Seminar Nasional "Negara. Pasar dan Otonomi Daerah", Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Riau, 07 Nopember 2006, Pekanbaru.
30. Sebagai Pembicara pada, Prospek Dunia Usaha dan Potensi Pembiayaannya oleh Perbangkan di Propinsi Riau, 28 Maret 2006, Bank Indonesia Pekanbaru.
31. Sebagai Peserta Kopernas XV dan Kongres XIV PERHEPI :

Mungkinkah Petani Sejahtera, 4 Agustus 2007, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), Hotel Sahid Raya, Surakarta.

32. Sebagai Peserta pada : Nasional Seminar on Research and Studies X : Teaching Grant, 25-27 November 2007, Ministry Of National Education Directorate General Of Higher Education (ADB Loan No.: 1792-INO) Diknas, Goodway Hotel, Batam.
33. Sebagai Pembicara pada : Seminar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) : Pembudayaan K3 Melalui Keunggulan Sumber Daya Manusia Dalam Menjamin Kelangsungan Usaha dan Mendorong Iklin Investasi Menuju Masyarakat Sejahtera. 21 Februari 2008, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Pekanbaru.
34. Sebagai Pembicara pada : Seminar Prospek Pariwisata Riau Dalam Kaitan Visit Indonesia 2008. 5 Maret 2008, Kadin Provinsi Riau, Pekanbaru.

VII. BUKU DAN JURNAL PUBLIKASI ILMIAH YANG DITERBITKAN

a. Buku Yang Diterbitkan

1. Analisis Perekonomian Daerah Riau (1999) : CPIS Jakarta
2. Analisis Kebijakan Pengembangan Koperasi Daerah Riau (2000); CPIS Jakarta
3. Visi dan Produktivitas Masyarakat dalam Pembangunan, (1999), Pusat Kajian Dinamika Pembangunan Universitas Riau, Pekanbaru
4. Teori Ekonomi Mikro : Diktat Kuliah, (2001). Laboratorium Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru
5. Teori Ekonomi Internasional : Diktat Kuliah, (2001). Laboratorium Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru.
6. Pengantar Teori Ekonomi Regional, (sedang proses), Rajawali Pers, Jakarta
7. Manajemen Sumberdaya Manusia : Dalam Perspektif Global (2004), Unri Press, Pekanbaru.

8. Menggesa dan Gejolak Perekonomian Indonesia : Memasuki Era Otonomi Daerah dan Globalisasi , (2005), Unri Press, Pekanbaru.
9. Pertumbuhan Dan Perubahan Struktur Perekonomian Provinsi Riau (Morphology Of Grwth Of Riau Province), Orasi Ilmiah, Dies Natalis Universitas Riau Ke 45 17 Nopember 2007.

b. Jurnal Ilmiah

1. Jurnal KIAT (TerAkreditasi No.: 26/DIKTI/Kep/2005): Volume 10, No. 2 Desember 2006 Pengembangan Kualitas Pembelajaran Manajemen Sumber Daya Manusia Melalui Pendekatan Kompetensi, Tahun 2006
2. Jurnal Bisnis Strategi (Terakreditasi SK No.39 Dikti/Kep/2004)-ISSN 1410-1246, Volume 16 N0.2 Desember 2007, Analisis Usahatani Hortikultura sebagai Komoditi Unggulan Agribisnis di Daerah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, Program Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
3. Jurnal KIAT (TerAkreditasi No.: 26/DIKTI/Kep/2005)-ISSN 1410-3834 : (sedang proses penerbitan) Tahun 2008 : Inovasi Metode Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan Metode Class Action :(sedang dalam proses penerbitan), Universitas Islam Riau.

VIII. TANDA JASA DAN PENGHARGAAN

1. Satya Lancana Karya Satya 10-Tahun, 28 Januari 1998, Pemerintah Republik Indonesia, Presiden RI.
2. Dosen Teladan-I, 17 Agustus 1998, Universitas Riau, Rektor UNRI.

IX. PENGALAMAN ORGANISASI

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1985-1987 | : | Pengurus IKAFE Universitas Riau, tahun |
| 1985-sekarang | : | Anggota Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) |
| 1984-1997 | : | Sekretaris pada Pengurus Ikatan Keluarga Riau, diBandung |

- 1993 : Pengurus RW XI Kelurahan Antapani Tengah
Kecamatan Cicadas, Kotamadya Bandung
- 1998-2003 : Ketua Laboratorium Ekonomi Regional FE-
UNRI
- 1999-2004 : Wakil Ketua Komisi Ekonomi Dewan Pakar
Daerah Provinsi Riau
- 2000-2008 : Pengurus Mesjid Al-Ikhwan Kamp. Kelapa
Pekanbaru
- 2001-2005 : Wakil Ketua DEKOPINWIL Provinsi Riau
- 2002 (tiga-bulan) : Pejabat Sementara Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas